

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



BIRO PENGADAAN BARANG & JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izinNya jualah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 selesai disusun untuk memenuhi kewajiban Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kierja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja Provinsi KalimantanSelatan serta Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2017 tentang Percepatan Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kaimantan Selatan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan ini merupakan pertanggung jawaban kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 kepada Pengguna Anggaran untuk mempertanggung jawabkan atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakan, serta mengukur keberhasilan kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.



*Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

Harapan kami dengan tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini, kiranya dapat digunakan oleh semua pihak yang berkompoten untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang pada tahun 2020 telah meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Dr. Ir. Roni Dwi Susanto.,M.Si pada bulan November 2020 sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Terbaik Tingkat Nasional dan mendapatkan Piagam Anugerah Pengadaan 2023 dengan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Peringkat Terbaik yang diserahkan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M serta menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sangat disadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini akan diterima dan semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama.

Banjarbaru, 9 Januari 2025
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740310 199903 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok.....	2
C. Sturuktur Organisasi.....	5
D. Isu Strategis SKPD.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
1. Eselon II.....	10
2. Eselon III.....	10
3. Eselon IV.....	12
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	17
1. Sasaran RPJMD.....	17
2. Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya dengan Tahun 2025.....	20
3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	26
4. Perbandingan Capaian Kinerja Biro dengan Regional & Nasional.....	32
5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	33
6. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Per Eselon.....	41
B. Akuntabilitas Keuangan.....	46
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2025.....	46
2. Rincian Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	48
Bab IV PENUTUP	53
A. Anggaran & Realisasi APBD 2025	53
B. Rincian Anggaran APBD 2025.....	56
C. Analisis Efektivitas Pengguna Sumber Daya	67
D. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya	68
E. Kesimpulan & Rekomendasi Efektivitas Serta Efisiensi	70
Lampiran.....	71
1. Perjanjian Kinerja.....	72



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2017 Tentang Percepatan Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip dari *good governance* menuntut dua hal, yaitu :

1. Kemampuan untuk menjawab dalam hubungannya dengan tuntutan yang diberikan oleh para aparatur pemerintah dengan menjawab secara periodik terkait dalam penggunaan kewenangannya, sumber daya dan capaian dari penggunaan sumber daya tersebut.
2. Dalam Pelaksanaan Kewenangan yang telah diberikan maka ada pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dengan mekanisme pertanggungjawaban.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban



melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN & TUGAS POKOK

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum pengembangan pengadaan barang dan jasa.
2. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
3. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
6. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk melaksanakan tugas maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan



advokasi pengadaan barang dan jasa.

- b) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
 - c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan.
7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 3 (tiga) Bagian yaitu :
- a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengelola strategis pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa.
 - II. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - III. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
 - IV. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.
- b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan system pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Menyusun rencana dan program kerja bagian.
- II. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian.



- III. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - IV. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Biro.
 - V. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Bagian.
 - VI. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Biro.
 - VII. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil elektronik.
 - VIII. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ.
 - IX. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa.
 - X. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
 - XI. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro.
- c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pembinaan, Tata Usaha, Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan dan Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan administrasi pada tata usaha, pembinaan sumberdaya manusia, pembinaan kelembagaan dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- II. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi pelayanan administrasi pada tata usaha biro pengadaan barang dan jasa.
- III. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi pembinaan sumberdaya manusia pengadaan barang dan jasa dan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa.
- IV. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
- V. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

Strategi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan meliputi pengendalian, perumusan kebijakan administratif, mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, layanan pengadaan secara elektronik serta bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

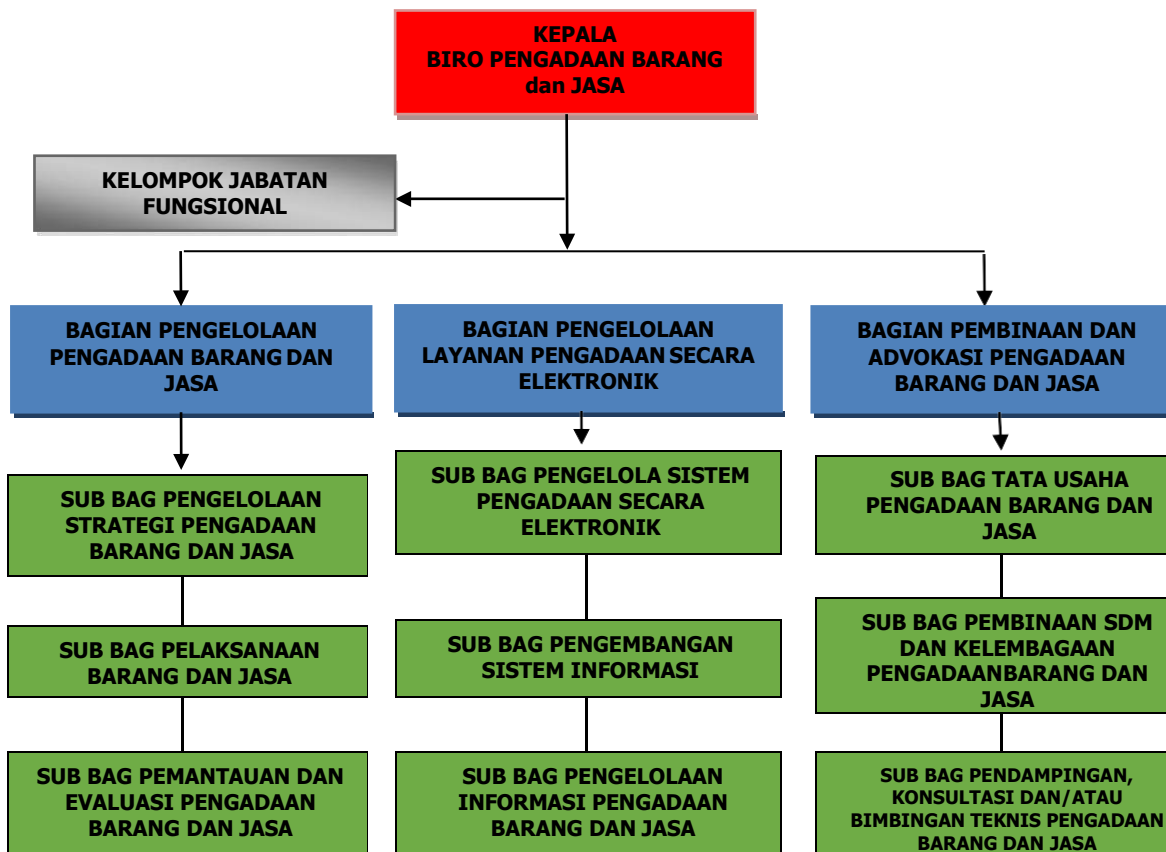


C. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kemampuan yang handal sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi sumber daya manusia yang dimiliki Biro Pengadaan Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebanyak 58 (Lima puluh delapan) orang pegawai dengan rincian berdasarkan jabatan dan golongan/ruang sebagai berikut :



a) Berdasarkan tingkat jabatan

No.	Uraian Jabatan	Jumlah	(%)
1.	Struktural (Eselon II, III & IV)	13	22.41
2.	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	31	53.44
3.	Fungsional Pranata Komputer	4	6.89
4.	Fungsional Umum/Pelaksana	10	17.24
Jumlah Seluruh Pegawai		58	100%

b) Berdasarkan golongan/kepangkatan

No.	Golongan/Kepangkatan & Jabatan	Jumlah	(%)
1.	IV/c Kepala Biro/Kepala Bagian	2	3.44
2.	IV/b Kepala Bagian/Fungsional	3	5.17
3.	IV/a Kepala Sub Bagian/Fungsional	7	12.06
4.	III/d Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Fungsional/Pranata Komputer/Pelaksana	15	25.86
5.	III/c Kepala Sub bagian/ Fungsional /Prakom/Pelaksana	11	18.96
6.	III/b Fungsional/Pelaksana	7	12.06
7.	III/a Fungsional	2	3.44
8.	II/d	0	0
9.	II/c	0	0
10.	II/b	0	0
11.	II/a	0	0
12.	IX Fungsional (PPPK)	9	15.51
13.	VII	1	1.72
14.	V	1	1.72
Jumlah Seluruh Pegawai		58	100%

D. ISU STRATEGIS SKPD

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Streng)

- 1) Struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat 2 Program, 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.5.016.281.750. Sarana dan prasarana unit kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan pada tahun 2025 ini sudah tercatat dan



diinventarisir dengan baik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan sarannya antara lain peralatan kantor mendukung program kerja dan kegiatan kerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 3) Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 mendapatkan 93.75 kategori sangat baik. Indikator penilaian terdiri Pemanfaatan Sistem Pengadaan yaitu SiRUP, e-Purchasing, Non e-Tendering/e-Purchasing, e-Tendering, Toko daring, dan e-Kontrak, serta Kualifikasi dan Kompetensi SDM selain itu Tingkat Kematangan UKPBJ.
 - 4) Realisasi Transaksi Paket Tender sebesar Rp.1.301.033.721.081 dari Pagu Anggaran Paket Tender Rp.1.417.897.382.702 dengan jumlah paket tender yaitu 277 Paket. Realisasi Transaksi Paket Non Tender sebesar Rp.306.894.225.762 dari Pagu Anggaran Paket Non Tender Rp.601.487.975.369 dengan jumlah paket non tender 2.571 paket. Total Realisasi e-Purchasing terdiri dari e-Katalog dan toko daring sebesar Rp.2.701.797.360.300 untuk e-Katalog Versi 5 terdapat jumlah paket 5.901 dengan nilai realisasi Rp.1.493.063.366.491 dan untuk e-Katalog Versi 6 terdapat jumlah paket 14.858 dengan nilai realisasi Rp.1.175.886.430.898. Serta realisasi paket tokodaring yaitu 1.392 paket dan realisasi transaksi Rp.32.847.562.911
 - 5) Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa terdapat pada Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Banjarbaru dan Pelayanan di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Banjarmasin. Penilaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp.96.60 (Sangat Memuaskan).
- b. Kelemahan (Weakness)
- 1) Memiliki dua kantor yang terpisah pada 2 tempat yaitu di Banjarmasin dan Banjarbaru maka menyulitkan optimalisasi kegiatan dan peningkatan kualitas pelayanan. Kantor di Banjarbaru bergabung dengan Biro yang lain sehingga pelayanan kurang optimal terutama tidak adanya jaringan telekomunikasi seluler yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2) Adanya keterbatasan ruangan kerja dan sarana prasarana peralatan kantor untuk Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa karena penambahan jumlah personal Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Serta kurangnya fasilitas dalam bimbingan teknis/pelatihan/Diklat bagi ASN terutama Fungsional



Pengelola Pengadaan Barang/Jasa karena kurangnya anggaran sehingga kemampuan/kompetensi SDM yang kurang merata bagi ASN terutama Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- 1) Dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi SDM ASN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka memanfaatkan fasilitas untuk mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Diklat agar meningkatkan kualitas kompetensi SDM ASN di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informatika/informasi yang sangat mendukung mobilitas pelaksanaan pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa seperti adanya sarana prasarana untuk ASN dalam memanfaatkan komputer/laptop dalam mencari ilmu/informasi untuk perkembangan ilmu.

b. Tantangan/Ancaman

- 1) Adanya regulasi pengadaan barang dan jasa yang berubah-ubah.
- 2) Tidak tepat waktu SKPD yang melaporkan terkait realisasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 3) Penambahan pegawai lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak dibarengi dengan penambahan ruang kerja dan peralatan kerja yang memadai.
- 4) Adanya efisiensi anggaran yang akan berdampak pada layanan yang diberikan kepada SKPD/Stakeholder dan juga tamu yang berkunjung ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta pemantauan dan monitoring progres pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa terutama paket strategis dan konstruksi tidak dapat dilaksanakan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2025. Uraian keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam capaian kinerja dengan membandingkan penetapan kinerja dengan realisasi kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.

- Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, dasar hukum tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, isu strategis SKPD serta sistematika penyajian.
- Bab II : Perencanaan kinerja berisi tentang rencana strategis kinerja dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja).
- Bab III : Akuntabilitas kinerja berisi tentang analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, serta pertanggung jawaban pencapaian hasil tahun 2025.
- Bab IV : Penutup berisi tentang kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja dengan adanya rencana tindak lanjut kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yang menunjukkan komitmen yang berisi Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan dalam menunjang pencapaian Visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu **“KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, & SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN”** yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Fungsi RENSTRA adalah sebagai pedoman bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa serta layanan pengadaan secara elektronik, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam upaya mendukung Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menyesuaikan dan menyelaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar sesuai dengan semua Program dan seluruh Kegiatan agar selaras dengan Misi Kepala Daerah dimaksud yang dirumuskan sebagai berikut : **TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT**. Untuk mendukung Misi Kepala Daerah maka memiliki tujuan dan sasaran serta penetapan kinerja agar mencapai target yang ditentukan.

1. Tujuan
Meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Sasaran
Meningkatkan kinerja Biro dan Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
3. Outcome
 - a) Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan
 - b) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah



B. PERJANJIAN KINERJA

1. ESELON II

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	90	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	30	
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks pelayanan publik	Indeks	4.01	
		Indeks kepuasan masyarakat	Point	95	
		Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan	Inovasi	4	
		Nilai SAKIP	Nilai	90.01	
		Indeks maturitas SPIP	Level	3	

2. ESELON III

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya proses pengadaan	Persentase proses pengadaan barang/jasa Provinsi Kalimantan Selatan	%	100	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	%	100	
		Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Persentase pemenuhan pelayanan publik	%	90	
		Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	Rasio	0.8	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa	Persentase UKPBJ Provinsi, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3	%	85	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi
		Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompoten	%	85	
2.	Meningkatnya kualitas layanan konsultasi, pendampingan dan bimtek pengadaan barang dan jasa	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	%	100	
3.	Meningkatnya persentase administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%	100	
4.	Meningkatnya persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100	



3. ESELON IV

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Terselenggaranya strategi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	Laporan	2	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa perangkat daerah yang efektif dan efisien	%	100	
		Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna pengadaan barang dan jasa	%	100	
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa	%	100	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	laporan	12	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan SKPD	%	100	
		Persentase pengelolaan paket tender yang diproses dengan tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	laporan	12	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi
		Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	%	100	
		Persentase realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia	%	70	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Terkolanya sistem pengadaan secara elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	laporan	12	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		Persentase SKPD yang menyusun dan menginput RUP serta diumumkan pada SiRUP tepat waktu	%	100	
		Persentase layanan konsultasi/pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/Unit kerja/ Penyedia/Pokja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	%	100	



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	12	Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Terkelolanya informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	laporan	12	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang & Jasa
		Persentase pelayanan informasi pengadaan barang & jasa pemerintah yang dapat diakses untuk masyarakat/pengguna layanan pengadaan barang dan jasa	%	100	
		Persentase dokumentasi data & informasi barang & jasa hasil pengadaan	%	100	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
	Terlaksananya penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang & jasa	Dok	12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan & SDM Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ Prov/Kab/Kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif)	%	85	
		Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan PBJP Provinsi & Kab/Kota	%	85	
	Terbinanya SDM pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang & jasa	Orang	33	
		Persentase SDM ASN selaku pengelola pengadaan barang & jasa yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	%	85	



*Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pertanggung Jawab
1.	Terlaksananya pendampingan, konsultasi dan/atau bimtek proses PBJ	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan	laporan	12	Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa
		Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	%	100	
		Persentase peserta bimtek/sosialisasi kegiatan PBJ yang memahami proses PBJ minimal 80	%	70	
		Persentase permasalahan sanggah & aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	%	100	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pertanggung Jawab
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Pemenuhan indikator SAKIP	%	85	
2.	Tersedianya dokumen pelaporan & analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan & analisis prognosis realisasi anggaran	Dok	4	
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pda SKPD	Dok	12	
		Persentase pelaksanaan administrasi, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, kearsipan dan umum	%	100	
3.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Laporan	2	
4.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	65	
5.	Tersedianya peralatan & mesin lainnya	Jumlah unit peralatan & mesin lainnya yang disediakan	Unit	36	



C. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
		3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
2.	PROGRAM KEBIJAKAN & PELAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa - Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik - Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa - Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa
		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa - Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa - Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang & jasa



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi adalah kegiatan membandingkan tingkat Capaian kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan perubahan paradigma tersebut maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 tergambar dari capaian 2 Program dan 9 Kegiatan dan 16 sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029, Penetapan Kinerja Tahun 2025, Rencana Kerja Tahun 2025.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 6 kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

1. SASARAN RPJMD

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Gubernur Kalimantan Selatan yang diemban oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat diuraikan sebagaimana berikut :



No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatkan kinerja Biro & perangkat daerah dibawah koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya efektifitas pengadaan barang & jasa SKPD diProvinsi Kalimantan Selatan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	90 Nilai	93.75 Nilai	104.17%
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30%	74.01	246.70%
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks pelayanan publik	4.01	4.06	101.24%
			Indeks kepuasan masyarakat	95 Point	96.60 Point	101.68%
			Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan	4 Inovasi	4	100%
			Nilai SAKIP	90.01	82.79	91.97
			Indeks maturitas SPIP	Level 3	2.76	92%
Rata-Rata Capaian						119.68%

Rumus :

1. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa : Penilaian LKPP RI dengan aspek penilaian dari LKPP RI
2. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan : $\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal melalui pengadaan} / \text{total belanja operasi dan modal} \times 100\%$
3. Indeks pelayanan publik : Total nilai aspek dalam pelayanan publik, terdapat 6 aspek dalam pelayanan publik yaitu kebijakan pelayanan publik; Profesional SDM; Sarana prasarana; Sistem informasi pelayanan publik; Konsultasi dan pengaduan; Inovasi
4. Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan : sistem pengembangan untuk mendukung pelayanan
5. Nilai SAKIP : Pemenuhan sub komponen/kriteria penilaian dengan memenuhi dokumen mulai dari perencanaan sampai evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dikoreksi oleh Inspektorat dan Biro Organisasi.
6. Indeks maturitas SPIP : Penetapan tujuan (identifikasi resiko), Struktur dan Proses



(Kebijakan, Prosedur, dan Sistem Pengendalian), Pencapaian tujuan (Pelaporan).
Pemenuhan data akan dievaluasi oleh Tim Inspektorat.

Penjelasan Target dan Realisasi yang diemban Biro Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Pencapaian indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 terealisasi sebesar 93.75 merupakan Penilaian Mandiri dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa disebabkan keluarnya Surat dari LKPP RI Nomor : 28006/SES/12/2025 Hal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) periode transisi tahun 2025 yang berisi :
 - a) LKPP saat ini sedang melakukan penyusunan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029
 - b) Penilaian ITKP Tahun 2025 sebagai periode transisi tidak akan dilakukan, sehingga nilai ITKP Tahun 2025 menggunakan nilai tahun sebelumnya yaitu nilai ITKP 2024
 - c) Pada tahun 2025 LKPP akan uji coba penilaian ITKP berdasarkan rancangan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. Uji coba tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan Kemeterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi penilaian ITKP dengan formula baru yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menerbitkan peraturan terbaru terkait pedoman penilaian tahun 2025-2029.
2. Pencapaian indikator Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan tahun 2025 terealisasi sebesar 74.01 dari target 30%, data diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik terealisasi dengan nilai 4.06 (Sangat baik) sesuai dengan rekap nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari aspek Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.
4. Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 96.60 diambil dari rata-rata Nilai IKM per Triwulan dengan melaksanakan survei pelayanan terhadap pengguna layanan di aplikasi e-Tamu.
5. Pencapaian Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dengan realisasi sudah mencapai 4 inovasi sesuai dengan ditargetkan. Inovasi sistem yang dikembangkan yaitu **Penambahan Fitur Perhitungan dan Pemantauan ITKP Secara Menyuluruh Untuk Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Pengembangan Sistem Amang SDM dengan Penambahan Fitur** (proses persetujuan dari kasubag ke kabag, koreksi format dan kesesuaian isi dokumen, persetujuan final Kepala Biro dan permintaan TTE), **Pengembangan Fitur Sistem Informasi dan Evaluasi (SiMANTEV)** dengan pengembangan modul pendataan serta dokumentasi paket proyek strategis termasuk fitur untuk memasukkan, mengelola dan memantau detail proyek strategis. Kemudian adanya **Pengembangan Fitur untuk E-Tamu** dengan fitur saran dan pengaduan serta fitur survei kepuasan masyarakat (SKM).
6. Pencapaian Indikator terkait Nilai SAKIP dengan nilai 82.79 didapat dengan pemenuhan komponen penilaian yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.
7. Pencapaian indikator Indeks Maturitas SPIP yaitu pada skor 2,762 dengan pemenuhan bukti dukung dari indikator penetapan tujuan, struktur, proses dan pencapaian tujuan.



2. PERBANDINGAN REALISASI DENGAN REALISASI TERKAIT (TIME SERIES)

a. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 & TAHUN 2024

No.		Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Eselon II (Kepala Biro)							
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Barang & Jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	85 Nilai	90 Nilai	93.75	93.75
			Rasio Nilai Belanja yang dilakukan Melalui Pengadaan	-	30%	-	74.01
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	-	4.01	-	4.06
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87	95 Point	99.70	96.60
			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	4 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi	4
			Nilai SAKIP	-	90.01	-	82.79
Indeks Maturitas SPIP	-	Level 3	-	2,762			
Eselon III (Kepala Bagian)							
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Kebutuhan Daerah	Persentase Proses Pengadaan Barang & Jasa Provinsi Kalsel sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
			Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100%	100%	100%	100%
			Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	100%	-	100%
			Rasio Nilai Belanja yang dilakukan Melalui Pengadaan	25%	-	73.36%	-
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang & Jasa yang sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan pelayanan publik	-	90%	-	90%
			Rasio gangguan sistem	0.8	0.8	0.8	0.8



Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

			pengadaan barang & jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan				
4.	Kepala Bagian Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalsel dan kualitas	Persentase UKPBJ Provinsi, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3	30%	85%	54.55%	100%
			Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	66.67%	85%	90.57%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan konsultasi pendampingan dan bimtek pengadaan barang dan jasa	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	-	100%	-	100%
		Meningkatnya persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	-	100%	-	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi biro pengadaan barang dan jasa	Persentase pelayanan administrasi tata usaha bro	100%		100%	-
Eselon IV (Kepala Sub Bagian)							
5.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya strategi pengadaan barang & jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	-	2 Laporan	-	2 Laporan
			Persentase paket pengadaan barang dan jasa perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

			oleh pengguna pengadaan barang dan jasa				
			Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%
6.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	-	12 Laporan	-	12 Laporan
			Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	100%	100%	100%	100%
			Persentase pengelolaan paket tender yang diproses dengan tepat waktu dan sesuai aturan	-	100%	-	100%
			Persentase pengelolaan katalog lokal	55%	-	55%	
7.	Kepala Sub Bagian Pemantauan & Evaluasi	Terlaksananya pemantauan & evaluasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pemantauan & evaluasi pengadaan barang dan jasa	-	12 Laporan	-	12 Laporan
			Persentase perangkat daerah & unit kerja yang menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	100%	100%	93.88%	100%
			Persentase realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia	-	70%	-	81.76%
			Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan pbj sesuai aturan	100%	-	93.51%	
8.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem	Terkelolanya sistem pengadaan secara	Jumlah laporan pengelolaan sisten pengadaan secara	-	12 laporan	-	12 laporan



	Pengadaan Secara Elektronik	elektronik	elektronik				
			Persentase SKPD yang menyusun & menginput RUP serta diumumkan pada SiRUP tepat waktu	100%	100%	100%	100%
			Persentase layanan konsultasi/pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/Unit kerja/penyedia/pokja dilingkup pemerintah provinsi Kalimantan selatan	100%	100%	100%	100%
9.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	-	12 laporan	-	12 laporan
			Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa	4 aplikasi/konten	-	4 aplikasi/konten	-
10.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	-	12 Laporan	-	12 Laporan
			Persentase pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses untuk masyarakat/pengguna layanan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%
			Persentase dokumentasi data dan informasi barang dan jasa hasil pengadaan	100%	100%	100%	100%
11.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan & SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	-	12 dok	-	12 dok
			Persentase rekomendasi tingkat kematangan	60%	85%	81.82%	100%



			kelembagaan UKPBJ Prov/Kab/Kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif)				
			Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota	100%	85%	100%	90%
		Terbinanya SDM pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa	-	33 orang	-	35 orang
			Persentase SDM ASN selaku pengelola pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	80%	85%	84.91	100%
12.	Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pedampingan, konsultasi dan/atau bimtek proses pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan	-	12 dok	-	12 dok
			Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
			Persentase peserta bimtek/sosialisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses pengadaan barang dan jasa minimal 80	65%	70%	68%	74%
			Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

13.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	4 dok	-	4 dok
			Pemenuhan SAKIP	-	85%	-	85%
		Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	4 dok	-	4 dok
			Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	12 dok	-
		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, kearsipan dan umum		100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	2 laporan	-	2 laporan
			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	65 paket	-	65 paket
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	36 unit	-	36 unit



b. REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN TARGET JANGKA MENENGAH

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI KINERJA					TARGET JANGKA MENENGAH				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM KEBIJAKANDAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	-	-	90.21	93.75	93.75	-	-	75	85	90
	Rasio Nilan Belanja yang dilakukan Melalui Pengadaan	-	-	-	-	74.01	-	-	-	-	30%
	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	4.06	-	-	-	-	4.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat	99.65		87	87	96.60	83		87	87	95
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan			3	4	4			3	4	4
	Nilai SAKIP	-	-	-	-	82.79	-	-	-	-	90.01
	Indeks Maturitas SPIP	-	-	-	-	2,762	-	-	-	-	Level 3
Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa	Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasibebas mark up	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	61.59 %	59.91 %	73.36 %	-	-	-	-	-	-
	Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket PBJ perangkatdaerah yang efektif dan efesien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

	digunakan oleh pengguna PBJ										
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi PBJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah laporan strategi pengadaan barang dan jasa	--	-	-	-	2 Lap	--	-	-	-	2 Lap
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengelolaan katalog lokal	-	-	50%	55%	-	-	-	50%	55%	-
	Persentase pengelolaan paket tender yang diproses dengan tepat waktu dan sesuai aturan	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	12 lap	-	-	-	-	12 lap
Pemantau dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan PBJ sesuai aturan	100%	100%	82.20 %	93.88 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan	100%	100%	93.87 %	93.51 %	-	100%	100%	93.87 %	93.51 %	-
	Persentase realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia	-	-	-	-	81.76 %	-	-	-	-	70%
	Jumlah laporan hasil pemantauan & evaluasi pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	12 Lap	-	-	-	-	12 Lap
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pemenuhan LPSE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	169%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio gangguan sistem	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8



Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

	pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan											
	Persentase pemenuhan pelayanan publik	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan terinput serta diumumkan pada SIRUP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase layanan konsultasi/pendampingan kepada SKPD/Unit kerja/penyedia/pokja di lingkup pemerintah provinsi kalsel	-	126.60%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	-	-	-	-	12 Lap	-	-	-	-	-	12 Lap
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa	3 aplikasi / konten	3 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	4 aplikasi/konten	-	3 aplikasi / konten	3 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	4 aplikasi/konten	-	-
	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	12 Lap	-	-	-	-	-	12 Lap
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase peningkatan pengguna/ pemakai yang mengakses informasi pada website resmi LPSE prov.Kalsel	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
	Persentase pelayanan informasi PBJ pemerintah yang dapat diakses untuk masyarakat/pengguna layanan PBJ	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%
	Persentase dokumentasi data dan informasi barang dan jasa hasil pengadaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang	-	-	-	-	12 Lap	-	-	-	-	-	12 Lap



Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

	& jasa										
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3	0%	21.43 %	45.45 %	54.55 %	100%	17%	17%	18.18 %	30%	85%
	Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	47%	86.67 %	97.56 %	90.57 %	100%	47%	50%	57.14 %	66.67 %	85%
	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%
Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ prov/kab/kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif)	30%	21.43 %	45.45 %	81.82 %	100%	30%	35%	40%	81.82 %	85%
	Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan PBJP Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	-	-	100%	100%	90%	-	-	100%	100%	85%
	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang & jasa	-	-	-	-	12 dok	-	-	-	-	12 dok
	Persentase SDM ASN selaku pengelola PBJ yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	100%	86.67 %	97.56 %	84.91 %	100	100%	50%	70%	84.91 %	85%
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM PBJ	-	-	-	-	33 orang	-	-	-	-	33 orang
Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses	53.66 %	57%	60%	68%	74%	50%	55%	60%	65%	70%



*Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025*

	PBJ dengan nilai minimal 80 (baik)											
	Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti. Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan	-	-	-	-	12 dok	-	-	-	-	-	12 dok
Tata Usaha	Pemenuhan indikator SAKIP	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	-	85%
	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, kearsipan dan umum	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun	-	12 dok	2 dok	6 dok	4 dok	-	12 dok	2 dok	6	4 dok	4 dok
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	12 dok	12 dok	6 dok	4 dok	-	12 dok	12 dok	6	4 dok	4 dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	116 stell	120 stell	248 stell	65 Lembar	-	116 stell	120 stell	248 stell	65 Lembar	65 Lembar
Administrasi Perangkat Daerah	Persentase kepuasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



*Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025*

	terhadap layanan kesekretariatan											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	752 L	-	-	100%	100%	752 L	-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	3 Dok	3 Dok	12 dok	12 dok	12 dok	3 dok	3 Dok	12 dok	12 dok	12 dok	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	100%	33 unit	43 unit	36 unit	100%	100%	33 unit	43 unit	36 unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	12 bln	12 Laporan	12 laporan	



c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BIRO PENGADAAN BARANG & JASA TAHUN 2025 DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN REGIONAL KALIMANTAN & NASIONAL

INDIKATOR	PERBANDINGAN						REALISASI NASIONAL
	KALSEL	KALTENG	KALBAR	KALTIM	KALTARA	TARGET NASIONAL	
Indeks Tata Kelola Pengadaan	93.75 Sangat baik	79.33 baik	82.50 baik	86.69 baik	89.22 baik	Minimal Baik >70 sd 90	Kementerian Dalam Negeri (93.65) Kemenpan RB (81.09) LKPP RI (90.02)

PENJELASAN :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) masih menjadi salah satu agenda Reformasi Birokrasi General pada Sasaran ke-3 (tiga) dari 5 (lima) Sasaran pada Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2025-2029, yaitu "Terbangunnya Perilaku birokrasi yang Beretika dan Inovatif untuk Mendukung Digital Governance yang Berkualitas menuju Human Based Governance". Maka LKPP saat ini sedang melakukan penyusunan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029 dan penilaian ITKP Tahun 2025 sebagai periode transisi tidak akan dilakukan **sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya yaitu Nilai ITKP Tahun 2024.**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pemantauan terhadap nilai ITKP Tahun 2025 dengan melakukan penilaian mandiri untuk menunggu LKPP melaksanakan uji coba terhadap penilaian ITKP dengan rancangan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. **Pada Tahun 2024 nilai ITKP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 93.75 (Sangat Baik).**



3. ANALISIS PENINGKATAN & PENURUNAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target 2025	REALISASI 2025	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
PROGRAM KEBIJAKAN & PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks tata kelola pengadaan barang & jasa	90 Nilai	93.75	Sesuai dengan surat LKPP RI Nomor 28006/SES/12/2025 Hal Surat pemberitahuan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan periode transisi tahun 2025 berisikan penilaian ITKP tahun 2025 tidak dilaksanakan disebabkan karena priode transisi dan nilai ITKP menggunakan nilai tahun sebelumnya (2024). Penilaian ITKP tersebut mempunyai factor keberhasilan dari penguatan regulasi, komitmen & dukungan Pimpinan, serta Optimalisasi Pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa, selain itu peningkatan kapasitas SDM.
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30%	74.01%	Sesuai dengan Permendagri No.18/Th.2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No.13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait indikator Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan target Nasional 33% sehingga Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengambil target



				30%. selain itu, menyesuaikan APBD Prov. Kalsel terutama pada Belanja Daerah, yang mana data/angka untuk Indikator Rasio Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan bersumber dari BPKAD Prov. Kalsel
	Indeks pelayanan publik	4.01	4.06	Realisasi indeks pelayanan publik melebihi target yang ditentukan hal tersebut disebabkan adanya penerapan standar pelayanan yang konsisten, komitmen pimpinan dan pengawasan serta partisipasi dan umpan balik dari pengguna layanan pengadaan barang/jasa
	Indeks kepuasan masyarakat	95 Point	96.60 Point	Penilaian berdasarkan dari survei aplikasi e-tamu yang berisikan penilaian terhadap kualitas pelayanan, responsivitas & profesionalisme petugas serta pengelolaan pengaduan yang efektif
	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan	4	4	
	Nilai SAKIP	90.01	82.79	Faktor penghambat dari tidak tercapainya sesuai target disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme identifikasi terkait kendala pelaksanaan kegiatan dan Informasi dalam laporan kinerja



				belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, pengukuran kinerja individu dalam pengukuran kinerja masih belum diberikan feedback atas pemantauan kinerja yang telah dilakukan sampai ke individu pegawai melalui validasi aktivitas harian
	Indeks maturitas SPIP	Level 3	2,76	Penyebab tidak tercapainya realisasi sesuai target yaitu dokumentasi dan bukti dukung belum lengkap sehingga diperlukan tindak lanjut untuk pelaksanaan evaluasi terhadap bukti dukung yang belum lengkap.
PENGELOLALAN PENGADAAN BARANG & JASA	Persentase proses pengadaan barang & jasa provinsi kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	100%	100%	
	Persentase pengadaan barang & jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100%	100%	
	Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	100%	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	100%	
	Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna pengadaan barang dan jasa	100%	100%	
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa	100%	100%	
	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 laporan	2 laporan	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase hasil pemilihan penyedia yang	100%	100%	



	sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD			
	Persentase pengelolaan paket tender yang diproses dengan tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	100%	100%	
	Persentase realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia	70%	81.76%	Keberhasilan dengan capaian yang melebihi target disebabkan perencanaan pengadaan yang disusun secara tepat waktu (kepatuhan terhadap RUP), koordinasi efektif antar pihak terkait sehingga terwujudnya realisasi belanja dapat tercapai sesuai rencana.
	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	
PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	
	Persentase pemenuhan pelayanan publik	90%	90%	
	Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	0.8	0.8	
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase SKPD yang menyusun dan menginput RUP serta diumumkan pada SiRUP tepat waktu	100%	100%	
	Persentase layanan konsultasi/pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/Unit kerja/penyedia/pokja dilingkup pemerintah provinsi kalsel	100%	100%	
	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 laporan	12 laporan	
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	



Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses untuk masyarakat/pengguna layanan pengadaan barang & jasa	100%	100%	
	Persentase dokumentasi data & informasi barang dan jasa hasil pengadaan	100%	100%	
	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang & jasa	12 laporan	12 laporan	
PEMBINAAN & ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase UKPBJ Prov, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3	85%	100%	Pencapaian realisasi melebihi target disebabkan karena semua UKPBJ Kab/Kota sudah mendapat tingkat kematangan level 3, hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan pembinaan ke UKPBJ Kab/Kota untuk membantu dalam pemenuhan bukti dukung pada 9 variabel.
	Persentase SDM Pengelola PBJ yang berkompeten	85%	100%	Pencapaian realisasi melebihi target disebabkan oleh adanya faktor pendorong Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memfasilitasi ASN agar mengikuti pelatihan/bimtek agar meningkatkan kompetensi SDM dengan mengoptimalkan anggaran yang pada DPA Biro Pengadaan Barang & Jasa
	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan PBJ	100%	100%	
	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%	100%	
	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100%	100%	
Pembinaan kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang & Jasa	Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ Prov/Kab/Kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi Level 3 (proaktif)	85%	100%	Rekomendasi tingkat kematangan untuk UKPBJ Kab/Kota menunjukkan



				bahwa sebagian besar UKPBJ telah memenuhi persyaratan dasar kelembagaan, proses bisnis dan tata kelola pengadaan. Namun demikian diperlukan penguatan pada aspek standarisasi proses, konsistensi penerapan kebijakan, serta pemenuhan bukti dukung yang berkelanjutan agar rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
	Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kab/kota	85%	90%	Realisasi yang melebihi target disebabkan karena dengan anggaran yang terbatas dapat mengoptimalkan pembinaan ke UKPBJ Kab/Kota secara zoom meeting perihal indeks tata kelola pengadaan dan tingkat kematangan.
	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dok	12 dok	
	Persentase SDM ASN selaku pengelola PBJ yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	85%	100%	Realisasi yang melebihi target disebabkan karena adanya komitmen kepala biro pengadaan barang dan jasa dalam mendorong peningkatan kompetensi SDM Pengadaan, Pelaksanaan pelatihan/bimtek/ Fasilitasi sertifikasi PBJ dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan



				anggaran yang tersedia
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM PBJ	33 orang	35 orang	
Pendampingan, konsultasi dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%	100%	
	Persentase peserta bimtek/sosialisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa minimal 80	70%	74%	Realisasi melebihi target disebabkan dalam pelaksanaan bimtek/sosialisasi, Biro PBJ mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, sehingga peserta dapat memahami apa yang disampaikan dalam materi terkait pengadaan barang/jasa
	Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	100%	100%	
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan	12 dok	12 dok	
Tata Usaha	Pemenuhan indikator SAKIP	85%	85%	
	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, kearsipan dan umum	100%	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	100%	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	4 dok	4 dok	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	100%	100%	
Penyusunan pelaporan & analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan & analisis prognosis realisasi anggaran	4 dok	4 dok	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut	65	65	



*Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025*

	kelengkapannya	Lembar	Lembar	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	100%	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan, dan kepegawaian yang disusun	12 dok	12 dok	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	36 unit	36 unit	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik	100%	100%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	



4. REALISASI KINERJA & CAPAIAN KINERJA PER ESELON TAHUN 2025 SEBAGAI BERIKUT :

A. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG & JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	90	93.75	104.17%	Upaya : 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan penilaian mandiri disebabkan Penilaian ITKP 2025 sebagai periode transisi untuk penyusunan pedoman penilaian ITKP sesuai dengan isi Surat dari LKPP RI Nomor : 28006/SES/12/2025 Tanggal 03 Desember 2025 Hal Surat Pemberitahuan Penilaian ITKP Periode Transisi Tahun 2025 2. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerag Provinsi Kalimantan Selatan terkait realisasi nilai belanja melalui pengadaan
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	30	74.01	246.70%	
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks pelayanan publik	Indeks	4.01	4.06	101.25%	
		Indeks kepuasan masyarakat	Poin	95	96.60	101.68%	
		Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan	Inovasi	4	4	100%	
		Nilai SAKIP	Nilai	90.01	82.79	91.98%	
		Indeks maturitas SPIP	Level	3	2.76	92%	



								<ol style="list-style-type: none">3. Pemenuhan bukti dukung dari indikator penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kebijakan pelayanan publik, profesional SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi4. Melakukan survei pelayanan melalui aplikasi e-tamu dengan kriteria penilaian yaitu persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran/masukkan, sarana dan prasarana5. Melaksanakan evaluasi terhadap sistem
--	--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>pengembangan yang mendukung pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk diupdate fitur/sistemnya</p> <p>6. Pemenuhan bukti dukung sesuai dengan Indikator dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi kinerja</p> <p>7. Pemenuhan bukti dukung sesuai dengan Indikator dalam penilaian dari penetapan tujuan, struktur, proses dan pencapaian tujuan</p> <p>Hambatan :</p> <p>1. Masih terdapatnya keterlambatan dalam pengumpulan pelaporan kinerja sehingga kurang optimalnya dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



								<p>2. Masih terdapat perbaikan dalam kualitas tujuan untuk pencapaian sasaran strategi</p> <p>Rencana Tindak Lanjut :</p> <p>1. Melaksanakan evaluasi internal setiap bulannya untuk realisasi yang belum terealisasi sesuai target</p> <p>2. Melaksanakan evaluasi/tindak lanjut atas penilaian SPIP untuk perbaikan kualitas tujuan dalam pencapaian sasaran strategi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rumus :

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan berdasarkan hasil penilaian dari LKPP RI dengan beberapa indikator yaitu pemanfaatan sistem pengadaan (Sirup, e-tendering, e-purchasing, non e-tendering dan non e-purchasing, e-kontrak), kualitas dan kompetensi SDM, serta tingkat kematangan.
2. Jumlah nilai belanja operasi dan modal melalui pengadaan dibagi dengan total belanja operasi dan modal dikalikan 100%
3. Total dari nilai aspek dalam pelayanan publik terdapat 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan publik, profesional SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan dan inovasi
4. Nilai pengukuran secara kuantitatif & kualitatif atas pendapat pengguna layanan pengadaan barang dan jasa dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
5. Jumlah inovasi pengadaan barang dan jasa berupa sistem/aplikasi pengembangan yang mendukung pelayanan
6. Pemenuhan sub komponen/kriteria penilaian dengan memenuhi dokumen mulai dari perencanaan sampai evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dikoreksi oleh inspektorat dan biro organisasi
7. Pemenuhan dalam komponen penilaian maturitas SPIP yang akan dievaluasi oleh tim inspektorat yaitu penetapan tujuan (identifikasi resiko), struktur dan proses (kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian), pencapaian tujuan (pelaporan).



B. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG & JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya proses pengadaan barang & jasa sesuai kebutuhan daerah	Persentase proses pengadaan barang dan jasa Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	%	100	100	100%	Upaya : 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan dan Optimalisasi Perencanaan dengan penyusunan RUP dan Pengunggahan di Sistem Informasi RUP tepat waktu serta penerapan sistem pengadaan elektronik 2. Penyusunan HPS yang akurat dan objektif dengan melakukan survei harga serta Penerapan analisis kewajaran harga dengan membandingkan harga penawaran dan harga pasar, harga kontrak sejenis sebelumnya, dan harga e-katalog 3. Upaya
		Persentase pengadaan barang & jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	%	100	100	100%	
		Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	100	100%	



							<p>meningkatkan persentase belanja melalui pengadaan barang/jasa dengan penguatan perencanaan pengadaan, percepatan pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik</p> <p>Hambatan : Tidak ada Tindak Lanjut : -</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Rumus :

1. Jumlah proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan proses pengadaan barang dan jasa dikalikan 100%
2. Jumlah paket tender yang direview dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dibagi dengan jumlah keseluruhan paket tender yang masuk ke pengadaan barang dan jasa dikali 100%
3. Realisasi paket pengadaan (Tender dan Non tender) dibagi total RUP (paket) dikali 100%

C. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100%	<p>Upaya :</p> <p>1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan menyusun dan memperbaharui SOP pengadaan</p>
		Persentase pemenuhan	%	90	90	100%	



		elayanan publik					
		Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	Rasio	0.8	0.8	100%	<p>elektronik sesuai ketentuan terbaru serta optimalisasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan seluruh paket pengadaan diumumkan dan diproses melalui SPSE.</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan menyusun standar pelayanan dan maklumat pelayanan serta pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>3. Penanganan teknis secara cepat dengan identifikasi dan perbaikan gangguan seperti pengecekan jaringan internet, server, dan perangkat pendukung secara berkala</p> <p>Hambatan : perubahan regulasi dan kebijakan yang berlaku dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik</p> <p>Tindak lanjut :</p>



							Koordinasi dan integrasi antara sistem pengadaan elektronik dengan sistem lain yang ada dalam organisasi untuk memastikan kelancaran operasionalnya
--	--	--	--	--	--	--	---

Rumus:

1. Jumlah pemenuhan LPSE yang diselesaikan dibagi dengan jumlah responden/tamu yang datang ke LPSE dikalikan 100%
2. Total informasi seputar pengadaan barang dan jasa yang sudah ditayangkan ke sosial media dibagi dengan total target/rencana konten yang akan ditayangkan dalam 1 tahun dikalikan 100%
3. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan

D. KEPALA BAGIAN PEMBINAAN & ADVOKASI

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ Prov.Kalsel dan kualitas SDM pengadaan barang & jasa	Persentase UKPBJ Prov, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3	%	85	100	117.65%	Upaya : 1. Optimalisa pemenuhan nilai ITKP kategori baik bagi provinsi, kab/kota se-kalsel 2. Memfasilitasi ASN & Non ASN yang akan mengikuti bimtek/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi 3. Optimalisasi pemenuhan indikator AKIP 4. Optimalisasi
		Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	%	85	100	117.65%	
2.	Meningkatnya kualitas layanan konsultasi pendampingan & bimtek pengadaan	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan	%	100	100	100%	



	barang dan jasa	jasa					
3.	Meningkatnya persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%	100	100	100%	5. Optimalisasi pemenuhan indikator SPIP 6. Optimalisasi pendampingan PBJ SKPD lingkup Pemprov Kalsel
4.	Meningkatnya persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100	100	100%	Hambatan : 1. Adanya efesiensi anggaran TA.2025 mengakibatkan terbatasnya anggaran untuk mengikuti peningkatan kompetensi bagi ASN 2. Jumlah anggaran yang minim/kurang dalam pemenuhan tugas kesekretariatan dan peralatan kerja 3. Masih kurangnya SDM yang memahami akuntabilitas kinerja SPIP Tindak lanjut : 1. Meningkatkan kompetensi SDM terutama tentang AKIP dan SPIP 2. Konsultasi dan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemprov Kalsel



Rumus :

1. Jumlah UKPBJ yang akan mencapai level kematangan UKPBJ pada level 3 dibagi jumlah UKPBJ yang belum mencapai level 3 dikalikan 100%
2. Jumlah ASN yang akan ikut bimtek/pelatihan dibagi dengan jumlah ASN yang belum mengikuti bimtek/pelatihan dikali 100%
3. Permasalahan pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan dibagi dengan total permasalahan yang diterima dikali 100%
4. Pemenuhan dokumen dalam penatausahaan dan pelaporan (kinerja, keuangan dan kepegawaian)
5. Pemenuhan dokumen SAKIP dari perencanaan sampai evaluasi terhadap laporan realisasi kinerja/keuangan

E. KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG & JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terkelolanya strategi pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa perangkat daerah yang efektif & efisien	%	100	100	100%	Upaya : 1. Peningkatan kualitas perencanaan dengan menyelaraskan perencanaan pengadaan dengan perencanaan anggaran dan program kegiatan 2. Mendokumentasikan seluruh proses pengadaan secara tertib 3. Mewajibkan analisa pasar sebagai bagian dari dokumen perencanaan pengadaan (HPS, Spesifikasi teknis, KAK) 4. Mengintegrasikan hasil riset analisa pasar ke dalam aplikasi perencanaan dan pengadaan
		Persentase hasil riset analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna PBJ	%	100	100	100%	
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi PBJ	%	100	100	100%	
		Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	Laporan	12	12	100%	



							<p>5. Mendorong penggunaan dokumen analisa pasar sebagai dasar penetapan HPS</p> <p>6. Menetapkan kebijakan melalui peraturan kepala daerah/surat edaran dan mensosialisasikan kebijakan strategi pengadaan kepada seluruh perangkat daerah.</p> <p>Hambatan : - Tindak lanjut : -</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Rumus :

1. Jumlah paket pengadaan yang telah sesuai dibagi dengan jumlah paket keseluruhan dikali 100%
2. Jumlah SKPD yang menggunakan hasil riset Analisa pasar dibagi dengan jumlah keseluruhan SKPD dikalikan 100%
3. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan strategi PBJ dibagi total seluruh perangkat daerah dikalikan 100%
4. Jumlah laporan realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pengelolaan stratei PBJ

F. KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG & JASAA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	%	100	100	100%	<p>Upaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh tahapan pemilihan penyedia dilaksanakan sesuai perpres 2. Menggunakan metode pemilihan yang tepat dan sah sesuai karakteristik paket
		Persentase pengelolaan paket tender yang diproses dengan tepat	%	100	100	100%	



		waktu dan sesuai aturan					3. Melakukan reviu dokumen pemilihan oleh UKPBJ sebelum proses pemilihan Hambatan : - Tindak lanjut : -
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	laporan	12	12	100%	

Rumus :

1. Jumlah SKPD yang setuju atau menerima hasil pemilihan penyedia dibagi dengan jumlah SKPD dikalikan 100%
2. Total paket tender yang sudah terealisasi dibagi dengan total RUP total
3. Jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

G. KEPALA SUB BAGIAN PEMANTAUAN & EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan pengadaan barang & jasa sesuai aturan	%	100	100	100%	Upaya : 1. Optimalisasi persentase jumlah perangkat daerah & unit kerja yang menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu dan akurat 2. Optimalisasi realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia Hambatan : masih adanya SKPD/Unit kerja yang belum menyampaikan laporan
		Persentase realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia	%	70	81.76	116.80%	
		Jumlah laporan hasil pemantauan & evaluasi pengadaan barang dan jasa	laporan	12	12	100%	



							realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu Tindak lanjut : diupayakan dan dihimbau kepada SKPD/unit kerja agar dapat segera menyampaikan laporan realisasi PBJ baik surat maupun email.
--	--	--	--	--	--	--	---

Rumus :

1. Jumlah perangkat daerah dan UPT yang menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu dan akurat dibagi jumlah perangkat daerah dan UPT dikalikan 100%
2. Jumlah realisasi belanja melalui pengadaan (tender, non tender, dan e-purchasing) dibagikan dengan nilai atau target transaksi pada RUP Penyedia
3. Jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa

H. KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terkelolanya sistem pengadaan secara elektronik	Persentase SKPD yang Menyusun RUP serta diumumkan pada SiRUP tepat waktu	%	100	100	100%	Upaya : 1. Memonitor penginputan SiRUP oleh seluruh SKPD dan Unit Kerja 2. Memberikan pendampingan terkait permasalahan penginputan SiRUP
		Persentase layanan konsultasi/pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/Unit	%	100	100	100%	



		kerja/Penyedia/Pokja dilingkup provinsi kalimantan selatan					3. Memberikan pelayan sesuai standar pelayanan dan SOP
		Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	laporan	12	12	100%	Hambatan : 1. SKPD & Unit kerja melakukan revisi penginputan SiRUP, namun setelah melakukan revisi terlambat untuk melakukan penginputan sebesar 100% 2. Masih ada SKPD/Unit kerja/Penyedia yang belum memahami terkait SPSE dikarenakan pergantian admin/operator Tindakanjuit : 1. Memberikan teguran setiap hari melalui WA grup SiRUP kepada SKPD & unit kerja yang penginputan SiRUP belum 100% dengan menginformasikan posisi RUP berdasarkan data



							<p>aplikasi SIMANTEV dan memastikan SKPD terkait mengembalikan posisi RUP menjadi 100% sesuai dengan surat pernyataan yang telah disampaikan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Rumus :

1. Jumlah SKPD yang telah menginput RUP dan SiRUP secara tepat waktu dibagi dengan total SKPD dikalikan 100%
2. Jumlah terlaksananya konsultasi, pendampingan dalam penyelesaian sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibagi total permintaan SKPD/unit kerja/lingkup pemprov kalsel dalam layanan konsultasi/pendampingan yang diterima dikalikan 100%
3. Jumlah laporan kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik

I. KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG & JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	12	12	100%	<p>Upaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat dengan stakeholder aplikasi pendukung pengadaan 2. Menyusun dan



							<p>menganalisa identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan.</p> <p>Hambatan : -</p> <p>Tindak lanjut : membuat dokumen administrasi pengembangan sistem informasi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Rumus :

1. Jumlah laporan hasil realisasi aplikasi/fitur/konten pendukung sistem informasi pengadaan barang dan jasa

J. KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG & JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terkelolanya informasi pengadaan barang dan jasa	Persentase pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses untuk masyarakat/pengguna layanan PBJ	%	100	100	100%	<p>Upaya : optimalisasi strategi dan teknik untuk meningkatkan pengunjung dari SKPD/Pihak lain yang mengakses website dan sosial media Biro Pengadaan Barang & Jasa</p> <p>Hambatan :-</p> <p>Tindak lanjut : -</p>
		Persentase dokumentasi data & informasi barang dan jasa hasil pengadaan	%	100	100	100%	



		Jumlah laporan pengelolaan informasi PBJ	laporan	12	12	100%	
--	--	--	---------	----	----	------	--

Rumus :

1. Realisasi bahan atau data sudah diupload ke Website dibagi dengan jumlah target informasi seputar PBJ yang diupload dalam 1 tahun dikalikan 100%
2. Jumlah data seputar pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sudah diupload ke social media (youtube, instagram, tiktok dan facebook) dibagi jumlah target terkait data pengadaan dalam 1 tahun dikali 100%
3. Jumlah data yang akan diupload untuk merealisasikan penyerbarluasan informasi

K. KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN & SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ Prov, Kab, Kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif)	%	85	100	117.65%	<p>Upaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemenuhan nilai ITKP kategori baik bagi provinsi, kab/kota sekalsel 2. Memfasilitasi ASN & Non ASN yang akan mengikuti bimtek/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi
		Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi dan Kab/Kota	%	85	90	105.88%	<p>Hambatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi anggaran TA. 2025 mengakibatkan terbatasnya anggaran untuk pembinaan ke



		Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	12	12	100%	UKPBJ Kab/Kota se-kalsel 2. Adanya efesiensi anggaran 2025 mengakibatkan terbatasnya anggaran untuk mengikuti peningkatan kompetensi bagi ASN Tindak lanjut : mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefesiensi mungkin dan yang prioritas
2.	Terbinanya SDM Pengadaan barang dan jasa	Persentase SDM yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa	%	85	100	117.65%	
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa	orang	33	35	106.06%	

Rumus :

1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang ada dikali 100%
2. Jumlah pembinaan atau monitoring kelembagaan UKPBJ kab/kota se-kalsel dibagi dengan jumlah kab/kota se-kalsel dikali 100%
3. Jumlah laporan realisasi kegiatan penataan kelembagaan UKPBJ setiap bulannya
4. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat dibagi dengan jumlah total keseluruhan SDM Biro PBJ dikali 100%
5. Jumlah orang (ASN) yang difasilitasi untuk mengikuti bimtek/pelatihan

L. KEPALA SUB BAGIAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI, DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terlaksananya penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai	%	100	100	100%	Upaya : mendorong pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimtek pengadaan barang/jasa lebih optimal lagi



		ketentuan					Hambatan : 1. Regulasi pengadaan barang dan jasa yang sangat dinamis 2. Pemahaman terhadap perang & tanggung jawab para pihak sebagai pelaku pengadaan belum optimal 3. Efisiensi dan keterbatasan anggaran Tindak lanjut ; 1. Optimalisasi fungsi pendampingan, konsultasi, bimtek PBJ bagi para pelaku pengadaan sehingga mampu beradaptasi mengikuti perkembangan regulasi yang ada menuju value for money 2. Semaksimal mungkin mengoptimalkan sumberdaya yang ada
		Persentase peserta bimtek kegiatan PBJ yang memahami proses PBJ dengan minimal 80 (baik)	%	70	74	105.71%	
		Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan	dokumen	12	12	100%	

Rumus :

1. Jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%
2. Jumlah peserta bimtek kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses pbj deng nilai 80 dibagi total keseluruhan peserta dikali 100%



3. Permasalahan saggah dan aduan yang berhasil ditindaklanjuti dibagi dengan total permasalahan saggah dan aduan yang diterima dikali 100%
4. Jumlah dokumen hasil pendampingan ke SKPD

M. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan indikator SAKIP	%	85	85	100%	Upaya : 1. Optimalisasi pemenuhan administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan dan aset, penatausahaan persuratan dan pemenuhan laporan bulanan 2. Menghimbau kepada pejabat struktural agar dapat menyampaikan laporan perjanjian kinerja tepat waktu 3. Menghimbau kepada PPTK agar dapat menyampaikan laporan fisik dan
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	4	4	100%	
2.	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen	4	4	100%	
3.	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, kearsipan dan umum	%	100	100	100%	
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip	dokumen	12	12	100%	



		dinamis pada SKPD					
4.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100%	keuangan tepat waktu 4. Pemenuhan indikator AKIP dan SPIP agar dapat memperoleh hasil yang maksimal Hambatan : Masih terlambatnya pengumpulan laporan kinerja dari pejabat struktural & laporan fisik serta keuangan dari PPTK untuk diinput ke e-monev dan e-sakip Tindak lanjut : akan lebih mengoptimalkan dan percepatan pengumpulan laporan bulanan dari pejabat struktural dan PPTK
5.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	65	65	100%	
6.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	36	36	100%	

Rumus :

1. Jumlah dokumen yang direalisasikan terkait perencanaan
2. Pemenuhan dokumen/data yang diminta sesuai indikator pada penilaian sakin
3. Realisasi dokumen pelaporan
4. Realisasi dokumen administrasi tata usaha dibagi total dokumen pelaksanaan administrasi tata usaha
5. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD
6. Target sesuai jumlah pegawai
7. Jumlah peralatan yang rusak/perlu diganti



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Didalam melaksanakan Program dan Kegiatan, Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak terlepas dari anggaran dana yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), pada tahun 2025 Biro Pengadaan Barang/Jasa memperoleh Pagu Murni sebesar Rp.4.325.897.650,- dan Pagu Perubahan sebesar Rp.5.016.281.750,-.

Dana yang digunakan untuk mengakomodir 2 Program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.4.647.377.473,- dengan realisasi keuangan 92.65% serta sisa anggaran sebesar Rp.368.904.277,- dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai penjelasan sebagai berikut :

- a) Efisiensi pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah, dapat dijelaskan bahwa untuk biaya tiket pesawat PP realisasinya kurang/dibawah pagu batas atas tertinggi yang tercantum di DPA-SKPD, begitu pula untuk penginapan/hotel ditempat tujuan perjalanan dinas untuk biayanya kurang/dibawah pagu atas tertinggi yang tercantum di DPA-SKPD.
- b) Efisiensi pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah, dapat dijelaskan bahwa pula untuk penginapan/hotel ditempat tujuan perjalanan dinas untuk biayanya kurang/dibawah pagu atas tertinggi yang tercantum di DPA-SKPD.
- c) Efisiensi pada rekening belanja honorarium narasumber kegiatan sosialisasi/bimtek, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah narasumber yang tercantum di DPA-SKPD, sebagian narasumber berasal dari kalangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri, sehingga besaran honorarium yang dibayarkan hanya 50% dari pagu yang tercantum di DPA-SKPD.
- d) Efisiensi pada rekening belanja modal peralatan dan mesin, dapat dijelaskan bahwa proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dilaksanakan



melalui Katalog Elektronik V.6 dan melalui Mini Kompetisi, sehingga barang yang didapat sesuai dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan dengan harga yang terbaik serta lebih rendah dari harga pagu yang tercantum di DPA-SKPD.

Secara keseluruhan penyerapan Realisasi Keuangan Tahun 2025 lebih rendah dari Pagu Anggaran / Batas Atas yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 2025, tetapi untuk Koefisien / **Realisasi Fisik pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sudah mencapai 100%**, dengan **Sisa Anggaran sebesar Rp.368.904.277,- (7.35%)** dari Pagu Anggaran yang merupakan hasil penghematan dan efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan oleh sesuai arahan pimpinan dan prinsip-prinsip pengadaan.



2. RINCIAN ANGGARAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG & JASA BERDASARKAN KEGIATAN DAN SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp.2.041.737.700	Rp.1.635.454.657	80.10	Rp.1.481.474.900	Rp.1.350.447.452	91.15
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.7.129.800	Rp.6.735.800	94.47	Rp. 6.145.000	Rp.5.815.000	94.63
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp.7.129.800	Rp.6.735.800	94.47	Rp. 6.145.000	Rp. 5.815.000	94.63
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.34.462.000	Rp.31.097.200	90.24	Rp.7.400.000	Rp.7.090.000	95.81
Penyusunan pelaporan dan analisis	Rp.34.462.000	Rp. 31.097.200	90.24	Rp. 7.400.000	Rp.7.090.000	95.81
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.95.892.000	Rp.95.516.000	99.61	Rp.19.500.000	Rp.19.336.200	99.16
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp.95.892.000	Rp.95.516.000	99.61	Rp.19.500.000	Rp.19.336.200	99.16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.625.221.900	Rp.575.800.767	92.10	Rp.494.429.900	Rp.461.145.652	93.27
Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	-	-	-	Rp.104.324.000	Rp.90.365.421	86.62
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Rp.625.221.900	Rp.575.800.767	92.10	Rp.390.105.900	Rp.370.780.231	95.05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.476.232.000	Rp.444.571.000	93.35	Rp.588.000.000	Rp.527.284.649	89.67
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.476.232.000	Rp.444571.000	93.35	Rp.588.000.000	Rp.527.284.649	89.67
Penyediaan Jasa Penunjang Permerintah Daerah	Rp.802.800.000	Rp.481.733.890	60.01	Rp.366.000.000	Rp.329.775.951	90.10



*Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025*

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 802.800.000	Rp.481.733.890	60.01	Rp.366.000.000	Rp.329.775.951	90.10
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA	Rp.6.220.459.000	Rp.5.411.189.302	86.99	Rp.3.534.806.850	Rp.3.296.930.021	93.27
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.1.345.159.600	Rp.1.172.400.376	87.16	Rp.625.229.750	Rp.592.527.149	94.77
Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa	Rp.531.734.800	Rp.460.154.163	86.54	Rp.281.736.750	Rp.270.539.255	96.03
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Rp.474.041.800	Rp.423.170.874	89.27	Rp.197.572.000	Rp.184.495.143	93.38
Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Rp.339.383.000	Rp.289.075.339	85.18	Rp.145.921.000	Rp.137.492.751	94.22
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp.2.398.327.000	Rp.1.981.248.393	82.61	Rp.1.313.919.800	Rp.1.218.068.063	92.70
Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	Rp.880.737.400	Rp.729.461.655	82.82	Rp.648.853.000	Rp.612.999.743	94.47
Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Rp.675.652.000	Rp.553.288.219	81.89	Rp.304.416.800	Rp.263.818.010	86.66
Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Rp.841.937.600	Rp.698.498.519	82.96	Rp.360.650.000	Rp.341.250.310	94.62
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.2.476.972.400	Rp.2.257.540.533	91.14	Rp.1.595.657.300	Rp.1.486.334.809	93.15
Pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa	Rp.817.056.000	Rp.749.935.764	91.79	Rp.469.893.300	Rp.448.638.955	95.48
Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Rp.605.988.400	Rp.528.035.762	87.14	Rp.321.575.500	Rp.306.389.157	95.28
Pendampingan, konsultasi, bimtek pengadaan barang dan jasa	Rp.1.053.928.000	Rp.979.569.007	92.94	Rp.804.188.500	Rp.731.306.697	90.94
Total Keseluruhan	Rp.8.262.196.700	Rp.7.046.643.959	85.29	Rp.5.016.281.750	Rp.4.647.377.473	92.65



3. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS & EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisa sistematis tentang upaya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam perencanaan yang menggambarkan adanya refocusing kegiatan, seluruh SKPD diwajibkan memfokuskan penganggaran pada program serta kegiatan yang prioritas di SKPD.

a. Analisis Efektivitas

No	Komponen	Analisa
1.	Kesesuaian input dengan sasaran kinerja	Anggaran yang diberikan masih belum mencukupi untuk mendukung sasaran kinerja yang telah ditargetkan untuk 2 program yaitu Program Kebijakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memfokuskan kegiatan seperti adanya koordinasi dan Konsultasi ke LKPP, pelaksanaan pembinaan ke UKPBJ Kab/Kota, meningkatkan kompetensi SDM PBJ, pemantauan proses pengadaan barang/jasa, terutama untuk paket strategis yang tersebar di Kab/Kota serta rapat/koordinasi untuk pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa.
2.	Ketersediaan dan kompetensi SDM	Kegiatan pembinaan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang tersedia masih kurang, sehingga belum dapat memfasilitasi seluruh pegawai, dikarenakan keterbatasan anggaran dan kouta pelatihan yang ada, sehingga hal ini berdampak terhadap profesionalitas dan kompetensi pegawai di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
3.	Relevansi kegiatan terhadap outcome	Dalam kegiatan proses pengadaan barang/jasa maka terpenuhinya kebutuhan barang/jasa untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam kegiatan pengawasan



		dan pengendalian pengadaan contohnya dalam pengawasan proses Tender, maka outcome yang dihasilkan adalah Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses Tender, dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi pengadaan maka meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses pengadaan, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga selalu berkoordinasi dengan Instansi SKPD terkait untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam pengadaan.
4.	Capaian target vs realisasi	Beberapa Indikator yang dapat membantu tercapainya Capaian yg lebih dari 100% dikarenakan realisasi yang diperoleh melebihi target yang sudah ditentukan, dengan adanya peningkatan efektifitas pengadaan barang/jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dan rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.
5.	Dampak terhadap outcome	Dampak terhadap outcome yaitu terciptanya pengadaan barang.jasa yang efektif, efisien, transparan, bersaing dan akuntabel, dalam rangka <i>value for money</i> . Peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan kepuasan masyarakat serta peningkatan integritas pelaku pengadaan.

b. Analisis Efisiensi

No	Komponen	Analisa
1.	Realisasi anggaran vs output/outcome	Realisasi anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.647.377.473,- dari pagu Rp. 5.016.281.750,- atau 92.65% hal ini memberikan gambaran bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan telah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan melaksanakan beberapa efisiensi dari



		sisi anggaran.
2.	Efisiensi biaya per output	Efisiensi biaya per output di Biro Pengadaan Barang dan jasa menunjukkan hasil positif. Dengan adanya efisiensi anggaran diawal Tahun Anggaran 2025, tidak menjadikan suatu hambatan untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mencapai target pelaksanaan kegiatan 100%, bahkan ada beberapa Sub Kegiatan yang melebihi target yang sudah di tentukan.
3.	Efisiensi waktu pelaksanaan	Dalam pelaksanaan kegiatan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah berjalan dengan baik yang tepat waktu, dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar bagian dan sub bagian, manajemen waktu yang diterapkan dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan kapasitas SDM yang kompeten dan memiliki kemampuan serta etos kerja sangat di butuhkan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
4.	Pemanfaatan teknologi	Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pemanfaatan teknologi yang digunakan yaitu SINERGI BANUA yang mana bertujuan untuk menginput realisasi kinerja tiap bulannya, serta aplikasi E-MONEV yang bertujuan untuk menyampaikan realisasi fisik dan keuangan tiap bulan. Disamping aplikasi tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga mengembangkan aplikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti SILAPRAJA, SIMANTEV, SIAN=MANGSDM, E-TAMU.
5.	Alternatif intervensi yang lebih hemat	Mengalihkan kegiatan yang harusnya bisa dilakukan dengan mengidentifikasi penghematan



		biaya dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
--	--	---

c. Kesimpulan dan Rekomendasi

1) Kesimpulan efektivitas

Berdasarkan analisis Efektivitas pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa aspek sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan baik dan lancar.

2) Kesimpulan efesiensi

Berdasarkan analisis Efesiensi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa aspek namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti keterbatasan Infrastruktur, Peralatan Kerja dan Peningkatan SDM yang Kompeten dan Profesional.

3) Rekomendasi

Rekomendasi yang disarankan untuk meningkatkan kemajuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang professional dan kompetem dalam pengadaan barang/jasa dengan mengikutkan para pegawai dalam Pelatihan/Bimtek terkait pengadaan barang/jasa.
- Diperlukannya penambahan infastruktur luas ruangan dan peralatan kerja karena adanya penambahan jumlah pegawai , sehingga luas ruangan dan peralatan kerja yang tersedia dirasa masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta kenyamanan para pegawai dalam bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Guberur Kalimantan Selatan.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kemampuan yang handal sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi sumber daya manusia yang dimiliki Biro Pengadaan Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebanyak 58 (Lima puluh delapan) orang pegawai.

Pencapaian target yang sudah ditetapkan untuk menjadi sasaran strategis mempunyai rata-rata capaian 119.68% (sangat memuaskan) terkait dengan indikator Indeks tata kelola pengadaan yang realisasi (93.75) melebihi target, indikator rasio nilai belanja melalui pengadaan yang realisasi (74.01%) melebihi target, indikator indeks pelayanan publik (4.06) dan indeks kepuasan masyarakat mempunyai realisasi (96.60) yang melebihi target serta jumlah inovasi yang diterapkan untuk mendukung pelayanan pengadaan barang dan jasa mempunyai realisasi (4 inovas) sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun untuk indikator Nilai SAKIP realisasinya tidak tercapai sesuai dengan target ditentukan disebabkan belum optimalnya mekanisme identifikasi terkait kendala pelaksanaan kegiatan dan untuk indikator indeks maturitas SPIP realisasinya tidak tercapai sesuai dengan target ditentukan disebabkan dokumentasi dan bukti dukung belum lengkap sehingga diperlukan tindak lanjut untuk pelaksanaan evaluasi terhadap bukti dukung yang belum lengkap. Indikator yang realisasinya tidak tercapai akan ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya evaluasi internal setiap bulannya untuk realisasi yang tidak tercapai dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat kegiatan agar Nilai SAKIP terealisasi sesuai target ditentukan dan indikator terkait indeks maturitas SPIP yang tidak mencapai realisasi sesuai target maka akan dilaksanakan evaluasi/tindak lanjut atas penilaian SPIP untuk perbaikan kualitas tujuan dalam pencapaian sasaran strategi.

Didalam melaksanakan Program dan Kegiatan, Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak terlepas dari anggaran dana yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), pada tahun 2025 Biro



Pengadaan Barang/Jasa memperoleh Pagu Murni sebesar Rp.4.325.897.650,- dan Pagu Perubahan sebesar Rp.5.016.281.750,-. Dana yang digunakan untuk mengakomodir 2 Program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.4.647.377.473,- dengan realisasi keuangan 92.65% serta sisa anggaran sebesar Rp.368.904.277,- dan realisasi fisik 100% serta sisa Anggaran sebesar Rp.368.904.277,- (7.35%) dari Pagu Anggaran yang merupakan hasil penghematan dan efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan oleh sesuai arahan pimpinan dan prinsip-prinsip pengadaan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi hambatan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan dalam percepatan pengumpulan laporan bulan dan jika ada nya keterlambatan maka akan mendapatkan surat teguran dari kepala biro pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut untuk tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan evaluasi internal sehingga target penilaian SAKIP akan dapat tercapai.
2. Melaksanakan evaluasi/tindak lanjut atas penilaian SPIP untuk perbaikan kualitas tujuan dalam pencapaian sasaran strategi
3. Anggaran yang diberikan masih belum mencukupi untuk mendukung sasaran kinerja yang telah ditargetkan untuk 2 program yaitu Program Kebijakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dalam rangka : meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memfokuskan kegiatan :
 - Koordinasi ke LKPP dan pelaksanaan pembinaan ke UKPBJ Kab/Kota.
 - Meningkatkan kompetensi SDM pegawai lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Melaksanakan pemantauan dan monitoring proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terutama untuk paket strategis dan konstruksi yang tersebar di Kab/Kota.
 - Pelaksanaan rapat/koordinasi untuk pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa, pelaksanaan strategi dan proses pengadaan barang/jasa serta fasilitasi pertemuan dengan UKPBJ Kab/Kota dan UKPBJ lain yang berkunjung ke Biro Pengadaan Baranga dan Jasa.

Untuk hal tersebut diatas diperlukan koordinasi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengoptimalkan anggaran untuk mencapai target tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini yang merupakan pertanggungjawaban kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pengguna anggaran untuk pertanggung jawaban atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakan, serta mengukur tingkat keberhasilan kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah

LAMPIRAN

INDEKS TATA KELOLA PENGADAN TAHUN 2025



* Monitoring Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ bisa dilihat melalui

<https://ppsdmlkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/kementerian-lembaga> untuk Kementerian/Lembaga

<https://ppsdmlkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/pemda> untuk Pemerintah Daerah

*data per 31 Oktober 2024

*data per 31 Oktober 2024

* Monitoring Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ bisa dilihat melalui

<https://siukpbi.lkpp.go.id/peta-kematangan>

Nomor : 28006/SES/12/2025 03 Desember 2025
Hal : Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode
Transisi Tahun 2025

Yth.

1. **Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga**
2. **Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dari pelaksanaan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2010-2025, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan DBRBN 2025-2045. DBRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif. Seiring dengan DBRBN 2025-2045 tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) masih menjadi salah satu agenda Reformasi Birokrasi General pada Sasaran ke-3 (tiga) dari 5 (lima) Sasaran pada Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2025-2029, yaitu "Terbangunnya Perilaku birokrasi yang Beretika dan Inovatif untuk Mendukung *Digital Governance* yang Berkualitas menuju *Human Based Governance*".

Menindaklanjuti hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi, dijelaskan bahwa tahun pengukuran untuk seluruh indikator pada penilaian ITKP dilakukan sampai dengan Tahun 2024.
2. Menindaklanjuti poin 1, maka LKPP saat ini sedang melakukan penyusunan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029.
3. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, disebutkan bahwa mekanisme penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 untuk indikator Reformasi Birokrasi General yang berasal dari Kementerian/Lembaga meso dapat menggunakan:
 - a. nilai terbaru, apabila Kementerian/Lembaga meso melaksanakan evaluasi di Tahun 2025; atau
 - b. nilai tahun sebelumnya, apabila Kementerian/Lembaga meso tidak melaksanakan evaluasi di Tahun 2025.
4. Mengacu pada poin 2 dan 3, maka penilaian ITKP Tahun 2025 sebagai periode transisi tidak akan dilakukan, sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu Nilai ITKP Tahun 2024.
5. Namun demikian, pada Tahun 2025 LKPP akan melakukan uji coba penilaian ITKP berdasarkan rancangan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. Uji coba tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi penilaian ITKP dengan formula baru yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menerbitkan peraturan terbaru terkait pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029.



6. Mekanisme penilaian ITKP Tahun 2025 untuk Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih dengan nomenklatur baru ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kementerian/Lembaga baru yang dibentuk dari pemisahan fungsi dari satu Kementerian/Lembaga dapat menggunakan nilai ITKP Tahun 2024 dari Kementerian/Lembaga sebelum pemisahan fungsi;
 - b. Kementerian/Lembaga baru yang menjalankan tugas dan fungsi baru yang sebelumnya belum ada, dapat menggunakan nilai ITKP Tahun 2024 dari Kementerian/Lembaga lama yang mengalami perubahan tugas dan fungsi ke Kementerian/Lembaga baru tersebut; dan
 - c. Kementerian/Lembaga yang baru terbentuk/bukan merupakan pecahan dari Kementerian/Lembaga sebelumnya akan dikecualikan (bukan mendapatkan nilai nol) dari penilaian ITKP Tahun 2025. Dengan dikecualikan dari penilaian ITKP Tahun 2025, maka tidak akan berdampak pada hasil akhir penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Iwan Herniwan

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : jjCiFM

Nomor Tiket : SK202512030005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telpon (0511)6749237 Fax (0511)6749237
Email : it.prov.kalsel@gmail.com atau itprovkalsel@yahoo.co.id
BANJARBARU 70733

Nomor : 700.1.2.1/2024/P.12/IP/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Banjarbaru, 15 Juli 2025
Kepada
Yth. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan
di - Banjarbaru.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan secara umum bertujuan mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan :

- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Hasil evaluasi terhadap Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah nilai hasil evaluasi atau dengan predikat Memuaskan (A). Untuk dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, agar senantiasa diupayakan perbaikan kualitas penerapan Sistem AKIP secara terus menerus. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
		2024
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,42
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,71
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,39
d. Evaluasi Kinerja	25,00	20,28
Nilai Hasil Evaluasi	100,00	82,79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Terimakasih atas perhatian dan Kerjasama Saudara.



INSPEKTUR,
AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700202 199603 1 002

- Tembusan kepada Yth. :
- Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
 - Arsip

A. Perencanaan Kinerja

Sub Komponen Kualitas

1. Masih terdapat target kinerja pada Perjanjian Kinerja 2024 yang masih belum memenuhi kriteria achievable, menantang dan realistis, contohnya adalah Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 85 (baik) dengan realisasi 93,75, karena realisasi tahun 2023 belum dijadikan perbandingan keberhasilan capaian kinerja terhadap kinerja utama dan atau realisasi tahun 2023 tidak disajikan didalam LAKIP.
2. Crosscutting yang telah dibuat belum ada penjelasan yang memadai terhadap hubungan kerja antar bidang dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Pengukuran Kinerja

Sub Komponen Kualitas

1. SKPD telah melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah secara berkala per triwulan atas rencana aksi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja perangkat daerah atas capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Sinergi Benua, sedangkan pengukuran kinerja individu dalam pengukuran kinerja masih belum diberikan feedback atas pemantauan kinerja individu pegawai melalui validasi aktivitas harian.
2. Perhitungan realisasi kinerja tidak disajikan secara memadai dalam LAKIP dan tidak disajikan menggunakan perhitungan yang ditetapkan dalam formulasi IKU.

C. Pelaporan Kinerja

a. Sub Komponen Kualitas

Efisiensi penggunaan anggaran yang disajikan pada Laporan Kinerja (LAKIP) hanya sebatas data yang belum dilengkapi dengan analisis yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.

b. Sub Komponen Pemanfaatan

1. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
2. Laporan Kinerja terlalu banyak menyajikan informasi tambahan yang tidak terlalu relevan dengan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sub Komponen Pemanfaatan

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian output dan outcome kinerja perangkat daerah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Bangun Praja, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70733
(Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
Telepon 0511-6749235, Faximile 0511-6749237
Laman <https://inspektorat.kalselprov.go.id>;
Pos-el inspektorat@kalselprov.go.id; it.prov.kalsel@gmail.com

Banjarbaru, 23 Desember 2025

Nomor : 700.1.2.7/005030.16/IP/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Evaluasi Maturitas SPIP
Tahun 2025

Yth. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan

di

Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Surat Tugas Inspektur Nomor 800.1.11.1/005030/IP/2025 tanggal 6 November 2025, kami sampaikan nilai maturitas SPIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar **2,762** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	2,000
2.	Struktur dan Proses	30%	0,552
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,210
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			2,762

Area yang memerlukan perbaikan (area of improvement), adalah sebagai berikut:

A. Penetapan Tujuan

Tujuan telah ditetapkan secara sistematis dan terdokumentasi, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

2. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategi pada Kualitas Program, sebagian kecil belum memiliki keterkaitan dengan Sasaran Strategi OPD.

B. Struktur dan Proses

Secara umum area struktur dan proses sudah terdefinisi dengan baik, agar dipertahankan skor nilainya untuk ditingkatkan pada penilaian maturitas SPIP pada tahun berikutnya.

C. Pencapaian Tujuan SPIP

Pada komponen ini diperlukan perbaikan yaitu pengukuran efektivitas pencapaian tujuan organisasi belum dilaksanakan dengan efektif, sehingga capaian outcome tidak terukur dengan baik.

Terhadap hasil Evaluasi maturitas SPIP terintegrasi tahun 2025 direkomendasikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan agar memperkuat komitmen dalam penerapan SPIP Terintegrasi melalui integrasi dalam sistem pengendalian internal ke dalam seluruh proses manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran, pengelolaan risiko, dan sistem akuntabilitas lainnya secara berkelanjutan dan terdokumentasi.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Maturitas SPIP terintegrasi tahun 2025, besar harapan kami agar seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti demi terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.



Inspektur,

Akhmad Fydayeen, S.H., M.Si., M.H., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700202 199603 1 002

REKAP NILAI PEKPPP MANDIRI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	INSTANSI	NILAI SEBELUM REKOMENDASI	NILAI SESUDAH REKOMENDASI	KATEGORI
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN	2.61	4.56	A (PRIMA)
2	BADAN PENGHUBUNG	0	4.33	A- (Sangat Baik)
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.33	4.28	A- (Sangat Baik)
4	BIRO ORGANISASI	4.33	4.33	A- (Sangat Baik)
5	RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	3.44	4.22	A- (Sangat Baik)
6	DINAS KEHUTANAN	3.94	4.22	A- (Sangat Baik)
7	DINAS PERINDUSTRIAN	2.5	4.17	A- (Sangat Baik)
8	DINAS PERHUBUNGAN	0.89	4.17	A- (Sangat Baik)
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1.94	4.11	A- (Sangat Baik)
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.11	4.11	A- (Sangat Baik)
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.06	4.06	A- (Sangat Baik)
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN	3.89	4.06	A- (Sangat Baik)
13	DINAS PARIWISATA	1.44	4	B (Baik)
14	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER	0.78	3.94	B (Baik)
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	2.17	3.89	B (Baik)
16	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.11	3.78	B (Baik)
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN	1.5	3.72	B (Baik)
18	BIRO HUKUM	1.89	3.72	B (Baik)
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	2.44	3.33	B- (Baik dengan Catatan)
20	RSGM GT.HASAN AMAN	0.11	3.28	B- (Baik dengan Catatan)
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA	3.22	3.22	B- (Baik dengan Catatan)
22	DINAS TENAGA KERJA DAN	1.61	3.17	B- (Baik dengan Catatan)
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.06	3.11	B- (Baik dengan Catatan)
24	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	3.11	3.11	B- (Baik dengan Catatan)

25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMUAN,	1.67	3.06	B- (Baik dengan Catatan)
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.5	3.06	B- (Baik dengan Catatan)
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	3	C (Cukup)
28	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0.72	3	C (Cukup)
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.5	2.89	C (Cukup)
30	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.44	2.56	C (Cukup)
31	DINAS PERDAGANGAN	1.11	2.56	C (Cukup)
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.11	2.44	- (Cukup dengan Catatan)
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.39	2.39	- (Cukup dengan Catatan)
34	DINAS KESEHATAN	0.72	2.22	- (Cukup dengan Catatan)
35	BIRO UMUM	1.61	2.11	- (Cukup dengan Catatan)
36	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.5	2.06	- (Cukup dengan Catatan)
37	INSPEKTORAT	1.94	1.94	- (Cukup dengan Catatan)
38	DINAS KOPERASI DAN UKM	0.72	1.61	- (Cukup dengan Catatan)
39	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.44	1.44	- (Cukup dengan Catatan)
40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.11	1.44	- (Cukup dengan Catatan)
41	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.28	1.28	- (Cukup dengan Catatan)
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.22	1.22	- (Cukup dengan Catatan)
43	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1	1	- (Cukup dengan Catatan)
44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0.67	1	- (Cukup dengan Catatan)
45	BIRO PEREKONOMIAN	0.67	0.67	- (Cukup dengan Catatan)

REKAP NILAI PEKPPP LOKUS KEMENPANRB				
NO	INSTANSI	NILAI INDEKS	KATEGORI	
1	RSUD dr. H. MOCH. ANSHARI SALEH	4.61	A (PRIMA)	
2	DINAS SOSIAL	4.52	A (PRIMA)	
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	4.51	A (PRIMA)	
4	RSUD ULIN BANJARMASIN	4.02	A- (Sangat Baik)	

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

LAPORAN.....	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).....	1
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II.....	4
PENGUMPULAN DATA SKM.....	4
2.1 Pelaksana SKM.....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Metode Pengolahan Data.....	5
BAB III.....	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	8
1.1 Jumlah Responden SKM.....	8
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	8
1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV.....	10
KESIMPULAN.....	10
LAMPIRAN.....	11
1. Kuesioner atau pertanyaan pada Aplikasi Buku Tamu Tahun 2025.....	11
2. Contoh Tanggapan dari Tamu.....	13
3. Dokumentasi pelayanan PBJ.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei KePuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 8 (delapan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kePuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kePuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Aplikasi Buku Tamu (e-tamu) yang dibuat oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang disebarkan kepada pengguna layanan yang berkunjung ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada Tahun 2025 kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan, survei dilakukan menggunakan aplikasi buku tamu (e-tamu) yang dibuat oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Kalsel, link pertanyaan dikirimkan kepada tamu yang sudah berkunjung dan disampaikan secara langsung ketika tamu sudah selesai menggunakan layanan yang diberikan, link bisa dikirimkan otomatis dari sistem melalui email atau whatsapp atau mengisi manual dengan mengklik di menu survey pada aplikasi buku tamu (e-tamu).

Pertanyaan pada Tahun 2025 :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ?
2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu/saudara(i) tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesesuaian biaya/tarif pelayanan yang menyatakan/diinformasikan secara "GRATIS" ?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?

7. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan ?

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya masuk ke dalam database aplikasi yang telah dibuat. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2025	1
2.	Pengumpulan Data	Juli – Desember 2025	132
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2025	1
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Januari 2026	2

2.5 Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

- a) Menambah unsur yang dianggap relevan.
- b) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

Contoh pengolahan indeks kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1									
1.									
dst.									
Jml Nilai per unsur									
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur/jml responden									

NRR tertimbang per unsur = $NRR \text{ per unsur} \times 0,091$									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- U1-9 : Unsur 1-9
- NRR : Nilai rata-rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) : IKM Unit pelayanan X 25

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu **1**.

Tabel : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh pada Tahun 2025 pengambilan atau pengumpulan responden berdasarkan jumlah tamu yang berkunjung pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

- Responden bulan Tahun 2025 data diambil dari data kunjungan tamu dan survey melalui aplikasi e-tamu yang dibuat oleh Biro PBJ, responden survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah 67 responden, adapun jumlah responden sebanyak 67 atau dapat dijabarkan total responden dari Instansi sebanyak 38.81% dari jumlah responden 67, responden tamu Perusahaan(PT/CV/dll) sebanyak 44.78% dari jumlah responden 67, tamu Kementerian 1.48% dari jumlah responden 67, dan tamu perorangan/lainnya sebanyak 14.93% dari jumlah responden 67, Adapun table jumlah responden terlampir :

No	Responden	Jumlah Responden yang terkumpul	Persentase responden
1	Tamu dari Instansi (ASN/Non ASN)	26	38.80%
2	Tamu Perusahaan (PT/CV/dll)	30	44.78%
3	Tamu dari Kementerian	1	1.49%
4	Tamu Perorangan/ lainnya	10	14.93%
	Total	67	100%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Data perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah dikumpulkan pada Tahun 2025 dengan 9 (sembilan) unsur dengan 67 responden yang sudah dihitung dengan nilai persepsi nya melalui excel (*terlampir terpisah pada laporan ini*).

1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

- Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM pada Tahun 2025 dengan 9 unsur pertanyaan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per Unsur	3.52	3.43	3.42	3.52	3.46	3.48	3.52	3.88	3.48
Kategori	B								
IKM Unit Layanan	88.10 (Baik)								

LAMPIRAN

1. Kuesioner atau pertanyaan pada Aplikasi Buku Tamu Tahun 2025

Pengisian Survei melalui link berikut <https://e-tamu.lpse.kalselprov.go.id/survey>


SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Persepsi Kualitas Layanan
pada Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kami ingin beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Anda.

Jenis Responden
Pilih Jenis Responden

Nama
Masukkan nama Anda

Email
Masukkan email Anda

No. Telepon
Masukkan nomor telepon Anda

Usia
Masukkan usia Anda

Jenis Kelamin
Pilih Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir
Pilih Pendidikan

Pekerjaan
Pilih Pekerjaan

Unit Kerja Tujuan
Pilih Unit yang Dikunjungi

Jenis Layanan yang diterima
Pilih Jenis Layanan

Berikutnya

© 2025 LPSE – Provinsi Kalimantan Selatan



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Persepsi Kualitas Layanan pada Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kami ingin beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Anda.

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu/saudara(i) tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ?

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?

- Tidak Cepat
- Kurang Cepat
- Cepat
- Sangat Cepat

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesesuaian biaya/tarif pelayanan yang menyatakan/ diinformasikan secara "GRATIS" ?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

7. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?

- Tidak Puas
- Kurang Puas
- Puas
- Sangat Puas

8. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?

- Tidak Ada
- Ada tetapi tidak berfungsi
- Berfungsi kurang maksimal
- Dikelola dengan baik

9. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara(i) tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan ?

- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

[Kembali](#)

[Kirim Survei](#)

2. Contoh Tanggapan dari Tamu

a. Contoh Tanggapan Survey per Responden

Rekap Survei - Per Responden Semua

Download Excel Download PDF

10 entries

No	Nama	Jenis Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM Raw	IKM Final	Absi
1	Dina Khaniyah	Pemerintah Daerah/Instansi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	100,00	
2	SOLIHUL AHMADI	Lainnya/Perorangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	100,00	
3	Andi Juan Razak Nur, S.M.	Pemerintah Daerah/Instansi	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,11	77,78	
4	Maimunah	Pemerintah Daerah/Instansi	3	3	3	5	5	3	3	4	3	3,11	77,78	
5	aulia safri	Badan Usaha (N/PT/Aneka)	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3,78	94,44	
6	Denny Purmanan	Pemerintah Daerah/Instansi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	100,00	
7	Normasari	Pemerintah Daerah/Instansi	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,00	100,00	
8	Kamalassari	Lainnya/Perorangan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,11	77,78	
9	Muhammad Faisal Rahman	Pemerintah Daerah/Instansi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22	80,56	
10	Andi Jueli razak nur	Pemerintah Daerah/Instansi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	75,00	

Menyapa 1 to 10 of 10 results

BPSI © 2024 Designed by EPSL All rights reserved.

b. Contoh rekap survey per unsur

Rekap Survei - Per Unsur Semua

Download Excel Download PDF

No	Kode	Unsur Pelayanan	Rata-rata Nilai	Skala 25-100
1	U1	Percepatan Pelayanan	3,44	85,94
2	U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,41	85,16
3	U3	Waktu Penyelidikan	3,41	85,16
4	U4	Biaya/Tarif	3,56	89,06
5	U5	Produk Spesifik/isi Jenis Layanan	3,44	85,94
6	U6	Kompetensi Prakteknya	3,30	82,50
7	U7	Perilaku Prakteknya	3,30	82,50
8	U8	Pengangan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,94	98,44
9	U9	Sarana dan Prasarana	3,50	87,50

BPSI © 2024 Designed by EPSL All rights reserved.

c. Contoh Rekap Survey

Buku Tamu
Meutia Admin

Rekap Survey - Semua Bagian Unit Kerja

Download Excel
Download PDF

Show 10 entries

No Responden	Bagian	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
5	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	3	3	3	3	3	3	3	4	3
6	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	3	3	3	3	3	3	3	4	3
7	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	3	3	3	4	3	4	3	4	4
9	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	3	4	3	4	4	3	3	4	4
10	BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Showing 1 to 10 of 11 results

1
2
3
4

Jumlah Responden : **32**

Jumlah	110	109	109	114	110	112	112	126	112	
NRR	3.44	3.41	3.41	3.56	3.44	3.59	3.50	3.94	3.50	
NRR Tertimbang	0.38	0.35	0.38	0.40	0.38	0.39	0.39	0.44	0.39	
Total NRR	3.52									
KM (Skala 25 – 100)	85,00									
Kategori	Sangat Baik									

Keterangan Nilai KM

Nilai Persepsi	Nilai Interval	KM Nilai Interval	Konversi KM	Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Cukup Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

© 2016 Designed by LPSI. All rights reserved.

3. Dokumentasi pelayanan PBJ





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. RAHMADDIN MY, A.KS, M.SI
Jabatan : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Ir. ARIADI NOOR, M.Si
Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

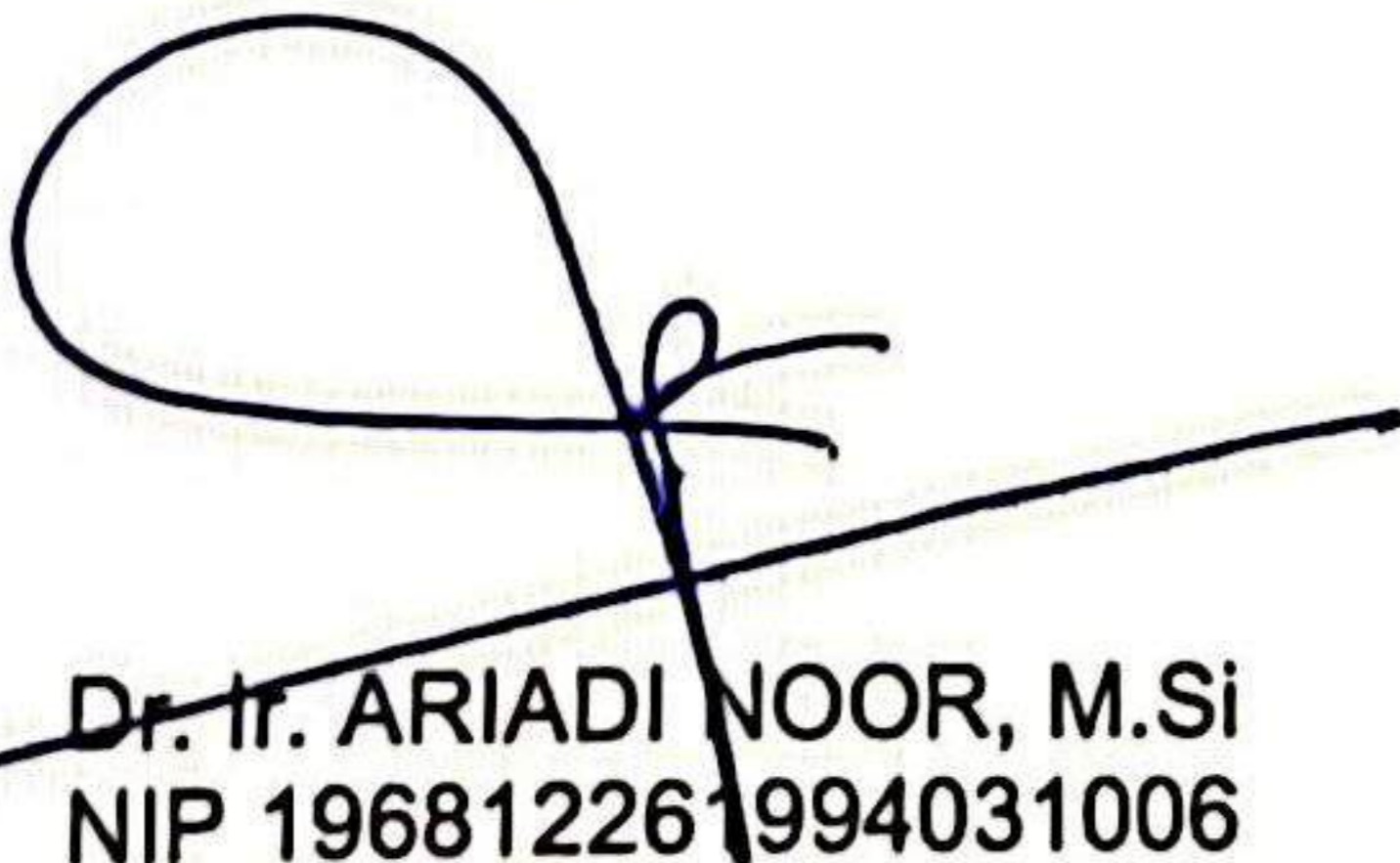
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. ARIADI NOOR, M.Si
NIP 196812261994031006



Dr. RAHMADDIN MY, A.KS, M.SI
NIP 197403101999031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

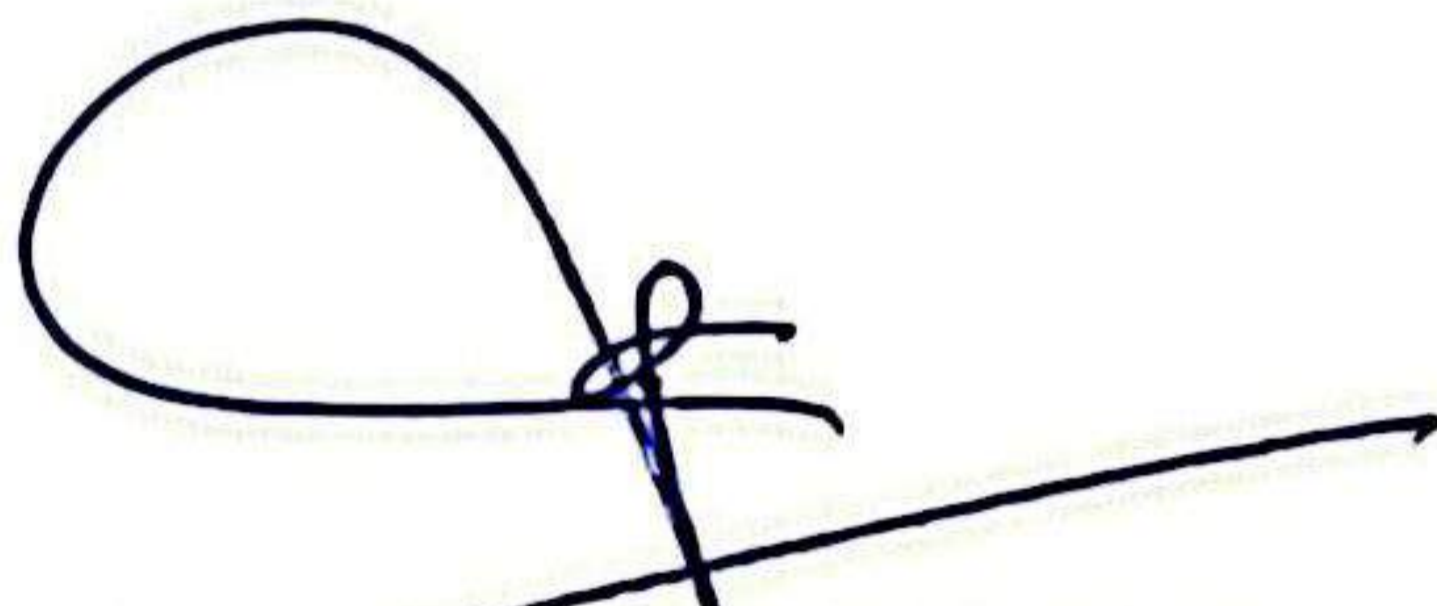
NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	90 Nilai
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	(Sangat baik) 4,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Poin
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	4 Inovasi
		Nilai SAKIP	90,01
		Indeks Maturasi SPIP	Level 3


PROGRAM : APBD	ANGGARAN	
1. Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.481.474.900
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	3.534.806.850
Jumlah	Rp.	5.016.281.750

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


 Dr. Ir. ARIADI NOOR, M.Si
 NIP 196812261994031006


 Dr. RAHMADDIN MY, A.KS, M.SI
 NIP 197403101999031005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
N I P : 19900329 201206 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Dr. RAHMADDIN MY, A.KS, M.SI
N I P : 19740310 199903 1 005
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.SI
NIP. 19740310 199903 1 005



PIHAK PERTAMA,

HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	100%
		2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100%
		3. Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.625.229.750,-	Sumber Dana : APBD

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks,M.Si
NIP. 19740310 199903 1 005


HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
N I P : 19681207 199003 1 008
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Dr. RAHMADDIN MY, A.KS, M.SI
N I P : 19740310 199903 1 005
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si
NIP. 19740310 199903 1 005



PIHAK PERTAMA,

Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan Kualitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Tingkat kematangan minimal level 3	85%
		Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	85%
2.	Meningkatnya kualitas layanan konsultasi Pendampingan dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100%
3.	Meningkatnya persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%
4.	Meningkatnya persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100%

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.6.145.000	Sumber Dana : APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.7.400.000	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.19.500.000	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.494.429.900	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.588.000.000	
2.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.1.595.657.300,-	Sumber Dana : APBD

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,


Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks,M.Si
NIP. 19740310 199903 1 005

PIHAK PERTAMA,


Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
N I P : 19710101 199703 2 009
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Dr. RAHMADDIN MY, A.KS, M.SI
N I P : 19740310 199903 1 005
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.SI
NIP. 19740310 199903 1 005



PIHAK PERTAMA,

MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase pemenuhan pelayanan publik	90%
		Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	Rasio 0,8

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.366.000.000,-	Sumber Dana : APBD
2.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp.1.313.919.800,-	Sumber Dana : APBD

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks,M.Si
NIP. 19740310 199903 1 005



MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : M. ARI WIBOWO SARIMAN, ST
N I P : 19770501 200903 1 005
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
N I P : 19900329 201206 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002



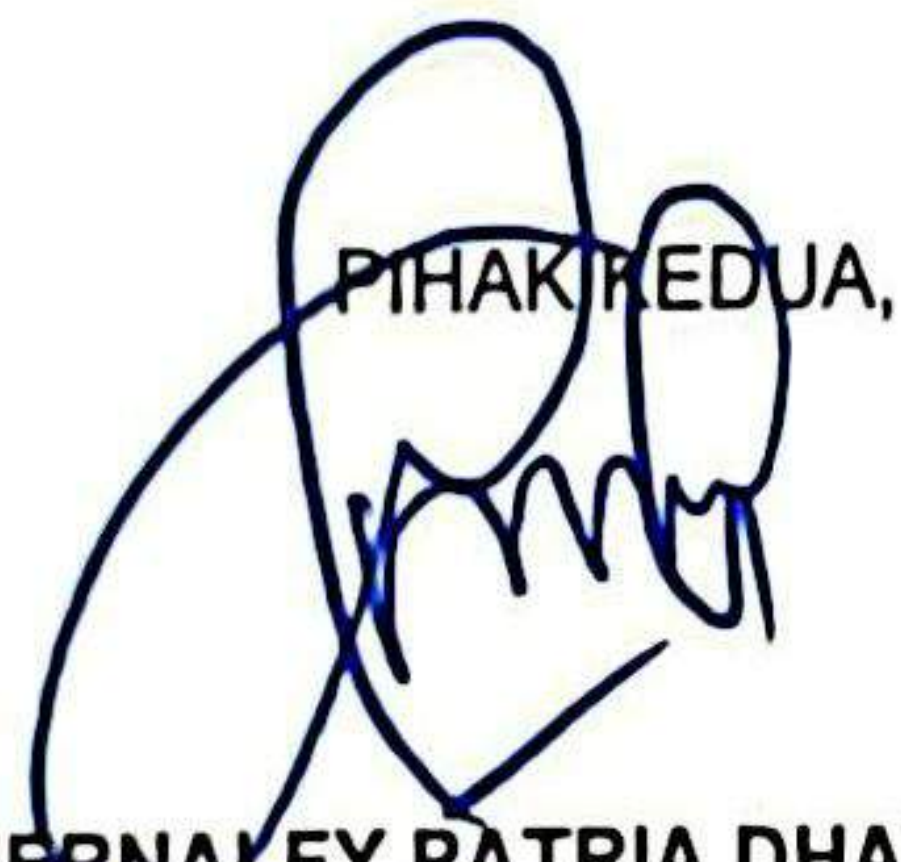
PIHAK PERTAMA,

M. ARI WIBOWO SARIMAN, ST
NIP.19770501 200903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terkelolanya strategi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 Laporan
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%
		Persentase hasil riset analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna pengadaan barang dan jasa	100%
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa	100%

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.281.736.750,-	Sumber Dana : APBD

PIHAK KEDUA,


HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,


M. ARI WIBOWO SARIMAN, ST
NIP.19770501 200903 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Ir. ANDRIE ISWANDI., S.T, M.I.Kom
N I P : 19810117 201001 1 009
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelaksaaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
N I P : 19900329 201206 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002

PIHAK PERTAMA,



Ir. ANDRIE ISWANDI., S.T, M.I.Kom
NIP. 19810117 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan
		Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	100%
		Persentase pengelolaan paket tender yang diproses dengan tepat waktu dan sesuai aturan	100%

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.197.572.000,-	Sumber Dana : APBD

PIHAK KEDUA,

HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,

Ir. ANDRIE ISWANDI., S.T, M.I.Kom
NIP. 19810117 201001 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : FAHRURAJI, SE, MT
N I P : 19700110 200701 1 019
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
N I P : 19900329 201206 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasirbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002

PIHAK PERTAMA,



FAHRURAJI, SE, MT
NIP. 19700110 200701 1 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan
		Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	100%
		Persentase realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia	70%

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.145.921.000,-	Sumber Dana : APBD

PIHAK KEDUA,


HERNALFY PATRIA DHARMA, S.IP
NIP. 19900329 201206 1 002

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,


FAHRURAJI, SE, MT
NIP. 19700110 200701 1 019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ASAN, SE
NIP : 19690702 198903 1 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP : 19681207 199003 1 008
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008

PIHAK PERTAMA,

METERAI TEMPEL
10000
BE8A9ANX094657740

ASAN, SE
NIP. 19690702 198903 1 004

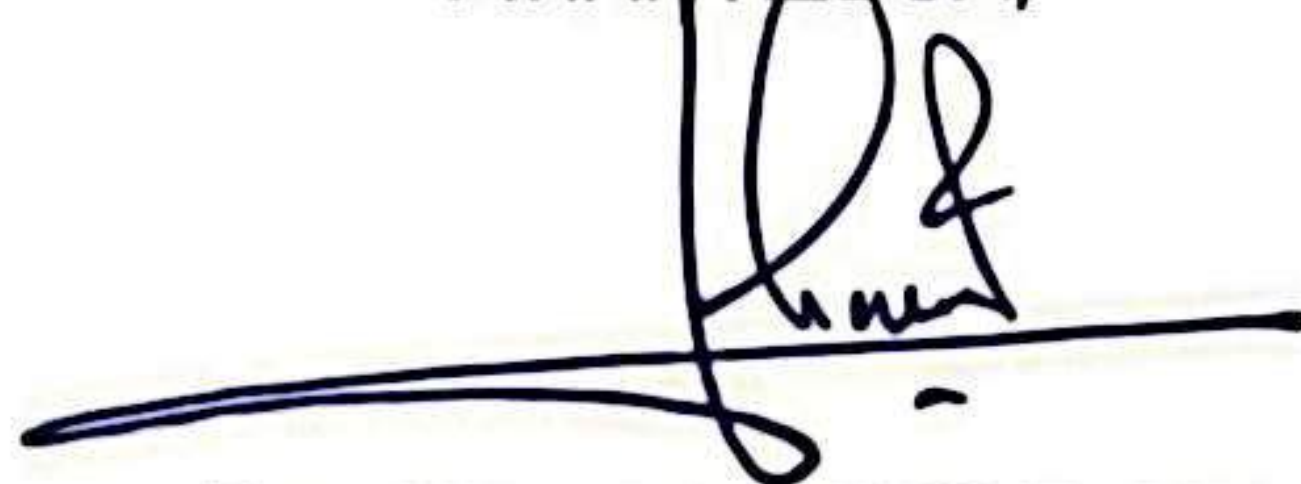
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terlaksananya penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen
		Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi Level 3 (Proaktif)	85%
		Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	85%
2.	Terbinanya SDM pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	33 orang
		Persentase SDM ASN selaku pengelola pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	85%

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.321.575.500,-	Sumber Dana : APBD
	2. Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.469.893.300,-	Sumber Dana : APBD

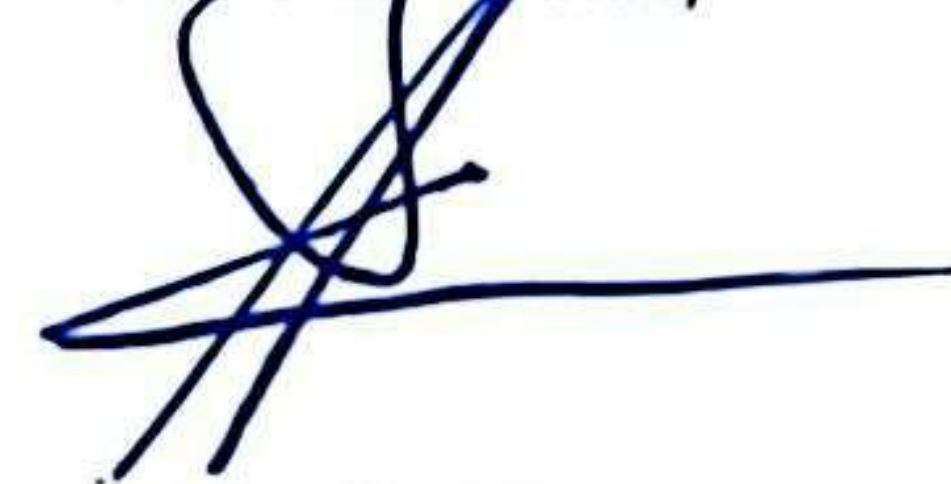
Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008

PIHAK PERTAMA,



ASAN, SE
NIP. 19690702 198903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : AKHMAD BUDI SURYAWAN, S.Pi
N I P : 19760323 200003 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Baran dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
N I P : 19681207 199003 1 008
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008

PIHAK PERTAMA,

AKHMAD BUDI SURYAWAN, S.Pi
NIP. 19760323 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terlaksananya pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis proses pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan	12 dokumen
		Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%
		Persentase peserta bimtek/ sosialisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses pengadaan barang dan jasa minimal 80	70%
		Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	100%

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.804.188.500,-	Sumber Dana : APBD

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



Drs. KHAILIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008

PIHAK PERTAMA,



AKHMAD BUDI SURYAWAN, S.Pi
NIP. 19760323 200003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : RA VERITAMA, SE
N I P : 19721010 201001 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
N I P : 19681207 199003 1 008
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008



PIHAK PERTAMA,

RA VERITAMA, SE
NIP. 19721010 201001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Pemenuhan indikator SAKIP	4 dokumen 85%
2.	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 dokumen
3.	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, kearsipan dan umum	12 dokumen 100%
4.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan
5.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	65 paket
6.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	36 unit

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.6.145.000,-	Sumber Dana : APBD
	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.7.400.000,-	Sumber Dana : APBD
	3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.19.500.000,-	Sumber Dana : APBD
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.104.324.000,-	Sumber Dana : APBD
	5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.390.105.900,-	Sumber Dana : APBD
	6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.588.000.000,-	Sumber Dana : APBD

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19681207 199003 1 008

PIHAK PERTAMA,



RA. VERITAMA, SE
NIP. 19721010 201001 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : ALFIANSYAH, SE, M.M
N I P : 19791116 200804 1 001
Jabatan : Kepala Sub bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
N I P : 19710101 199703 2 009
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009

PIHAK PERTAMA,



ALFIANSYAH, SE, M.M
NIP. 19791116 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 Laporan
		Persentase SKPD yang menyusun dan menginput RUP serta diumumkan pada SiRUP tepat waktu	100%
		Persentase layanan konsultasi/ pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/unit kerja/penyedia/pokja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	100%

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.366.000.000,-	Sumber Dana : APBD
2.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp.648.853.000,-	Sumber Dana : APBD

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009

PIHAK PERTAMA,



ALFIANSYAH SE, M.M
NIP. 19791116 200804 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD NOOR FUADY S. Kom
N I P : 19851229 201101 1 006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
N I P : 19710101 199703 2 009
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

MAHRITA YANUARTI, S.PI, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009

Bandarbaru, Oktober 2025
PIHAK PERTAMA,

M. NOOR FUADY S. Kom
NIP. 19791217 201001 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.304.416.800,-	Sumber Dana : APBD

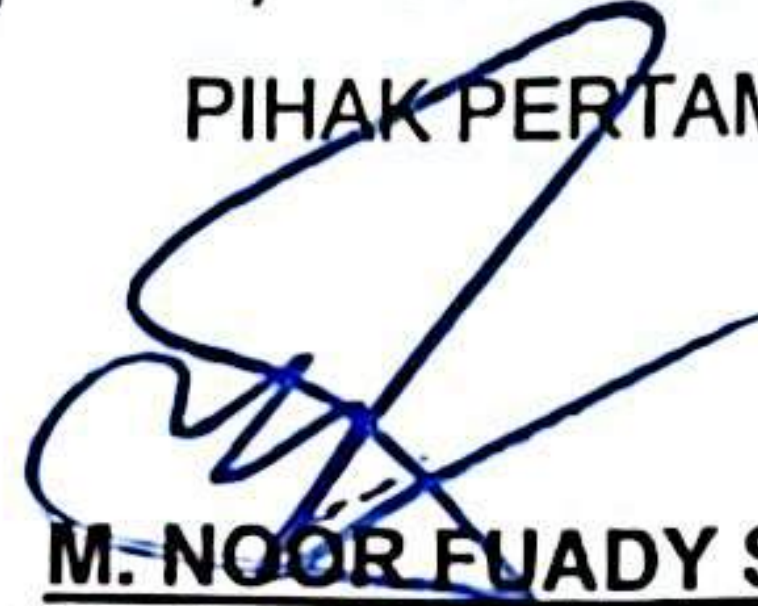
Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009

PIHAK PERTAMA,



M. NOOR FUADY S.Kom
NIP. 19791217 201001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : NOOR KHALIDAH, S. Sos.I
N I P : 19800602 201001 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
N I P : 19710101 199703 2 009
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun Anggaran 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MAHRITA YANUARTI, S.PI, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009



NOOR KHALIDAH, S. Sos.I
NIP. 19800602 201001 2 004

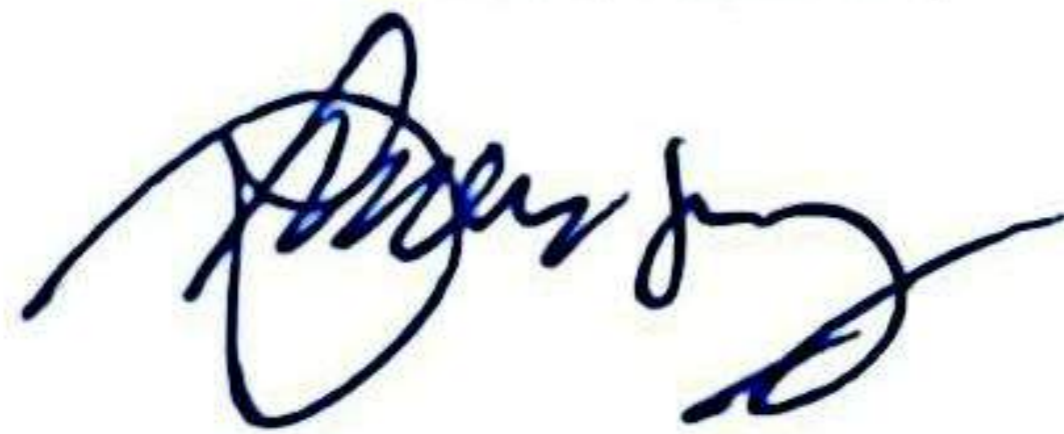
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO. (1)	KINERJA UTAMA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terkelolanya informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan
		Persentase pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses untuk masyarakat/pengguna layanan pengadaan barang dan jasa	100%
		Persentase dokumentasi data dan informasi barang dan jasa hasil pengadaan	100%

No. (1)	Program/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Rp.360.650.000,-	Sumber Dana : APBD

Banjarbaru, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



MAHRITA YANUARTI, S.Pi, M.S
NIP. 19710101 199703 2 009

PIHAK PERTAMA,



NOOR KHALIDAH, S. Sos.I
NIP. 19800602 201001 2 004

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	TARGET DAN CAPAIAN			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan Oktober (realisasi:targetx100%)
					Target Indikator	Realisasi s.d Bulan ini	% Capaian		
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, RKA)	2	Dokumen	4	4	100,00%		
		Pemenuhan Indikator SAKIP	85%	Persen	85%	85,00%	100,00%	100%	100,00%
		Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Penyusunan Indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	12	Dokumen	12	12	100,00%		
2.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1	1	100,00%		
		2. Melaksanakan Input Data Laporan pada e-Monev & Sinergi Banua	12	Laporan	12	12	100,00%		
3.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktivitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Penyusunan Laporan Kinerja	12	Laporan	12	12	100,00%		
		2. Menyusun dan Melaksanakan Penatausahaan dan Input Data Keuangan pada SIPD	12	Laporan	12	12	100,00%		
		3. Penyusunan Laporan LKPJ dan LPPD	1	Laporan	1	1	100,00%		
		4. Penyusunan Indikator SPIP	25	Indikator	25	25	100,00%		

	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset, Persuratan dan Umum	12	Dokumen	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
	Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
	1. Menyusun Dokumen Anggaran	2	Dokumen	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
	2. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Pertanggungjawaban Keuangan	12	Laporan	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
	3. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
	4. Melaksanakan Penatausahaan Persuratan/Srikandi	12	Dokumen	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
	5. Melaksanakan Penatausahaan Aset	4	Laporan	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
	Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
	1. Melaksanakan rapat koordinasi terkait permasalahan pengadaan barang/jasa	0	Kali	10	11	110,00%		
	2. Konsultasi dan pendampingan kepada SKPD terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa	0	Laporan	2	2	100,00%		
5.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	65	100,00%	100,00%	100,00%
	Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
	1. Melaksanakan proses pengadaan pakaian sasingan untuk pegawai	246	Paket	65	65	100,00%		
6.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	36	36	100,00%	100,00%	100,00%
	Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
	1. Melaksanakan proses pengadaan peralatan penunjang kerja (Komputer PC, Laptop, Meja Kerja Partisi, Kursi Kerja dan Stabilizer Kamera)	43	Unit	36	36	100,00%		

Penjelasan per Indikator Kinerja

Upaya

1. Optimalisasi pemenuhan administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan dan aset, penatausahaan persuratan dan pemenuhan laporan bulanan
2. Menghimbau kepada Pejabat Struktural agar dapat menyampaikan laporan perjanjian kinerja tepat waktu
3. Menghimbau kepada PPTK agar dapat menyampaikan laporan fisik dan keuangan tepat waktu
4. Pemenuhan indikator AKIP dan SPIP agar dapat memperoleh hasil yang maksimal

Hambatan

Masih terlambatnya pengumpulan Laporan Kinerja dari Pejabat Struktural dan Laporan Fisik dan Keuangan dari PPTK untuk di input ke e-Monev dan e-Sakip

Rencana Tindak Lanjut


Akan lebih meoptimalkan dan percepatan pengumpulan laporan bulanan dari Pejabat Struktural dan PPTK

Mengetahui :
Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,


Drs. KHAILIL ANWAR, MM
NIP. 196812071990031008

Banjarbaru, 30 Desember 2025

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,


RA VERITAMA SE
NIP. 197210102010011002

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESEMBER 2025

NAMA SKPD
NAMA JABATAN

: BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
: KEPALA SUB BAGIAN PENDAMPINGAN KONSULTASI DAN /ATAU BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	TARGET DAN CAPAIAN			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan Januari (realisasi:targetx100%)
					Target Aktifitas	Realisasi s.d Bulan Ini	% Capaian		
1.	Terlaksananya pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis proses pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan	100	Persen	100	100,00	100%	100%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas			Capaian Aktifitas
		Melaksanakan pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop/FGD bagi pelaku pengadaan	4	Kegiatan	4	4			100%
		Persentase Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan nilai minimal 80 (baik)	68	Persen	70	74	106%	75%	106%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas			Capaian Aktifitas
		Menilai sejauh mana persentase peserta mencapai tujuan pembelajaran bimtek sosialisasi	68	Persen	70	74			106%
		Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100,00	100,00%	100%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas			Capaian Aktifitas
		Menyusun dokumen permasalahan dan tindak lanjut sanggah dan aduan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	12	Laporan	12	12			100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	12	100,00	100,00%	100%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas			Capaian Aktifitas
		Memberikan fasilitas terkait fungsi layanan konsultasi PBJ dan pemenuhan pendampingan/narasumber	12	Laporan	12	12			100,00%

Penjelasan per Indikator Kinerja

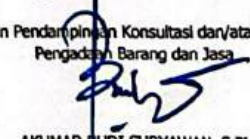
1. Upaya : Mendorong pelaksanaan Pendampingan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa lebih optimal lagi
2. Hambatan : - Regulasi Pengadaan Barang/Jasa yang sangat dinamis
- Pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab para pihak sebagai pelaku pengadaan (PA,KPA,PPK, Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, Penyedia) belum optimal
- Efisiensi dan keterbatasan anggaran
3. Rencana Tindak Lanjut : - Optimalisasi fungsi Pendampingan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa bagi para pelaku pengadaan sehingga mampu beradaptasi mengikuti perkembangan regulasi yang ada menuju *value for money*
- Semaksimal mungkin mengoptimalkan sumberdaya yang ada

Mengetahui
Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,


Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 196812071990031008

Banjarbaru, 30 Desember 2025

Kepala Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang dan Jasa


AKHMAD BUDI SURYAWAN, S.Pi
NIP. 197603232000031002

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	TARGET DAN CAPAIAN			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan September (realisasi:targetx100%)
					Target Indikator	Realisasi s.d Bulan ini	% Capaian		
1.	Terlaksananya Penataan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas		Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas
		1. Melaksanakan Penyusunan Laporan Penataan Kelembagaan UKPBJ Prov. Kalsel	12	Laporan	12		12		100%
		Persentase Rekomendasi Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menjadi level 3 (proaktif) i	84,62%	Persen	85,00%	100,00%	117,65%	100,00%	117,65%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas		Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas
		1. Menyusun daftar UKPBJ Kabupaten/ Kota yang belum mencapai level 3	1	Dokumen	1		1		100%
		2. Memantau dan mendorong UKPBJ Kabupaten/Kota untuk percepatan pemenuhan indikator kematangan level 3 dan ITKP	12	Laporan	12		12		100%
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	Persen	85,00%	90,00%	105,88%	100,00%	105,88%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas		Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas
		1. Melaksanakan pembinaan ke UKPBJ Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pencapaian level 3 dan nilai ITKP kategori Baik	13	Kabupaten/Kota	10		10		100,00%
		2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis UKPBJ Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalsel	1	Kegiatan	1		1		100%
		3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah UKPBJ Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalsel	1	Kegiatan	1		1		100%

2. Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40	Orang	35	35	100,00%	100,00%	100,00%
	Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas		Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas
	1. Penyusunan Data Pegawai Yang Akan Mengikuti Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	Data	1		1		100,00%
	Persentase SDM ASN dan Non ASN selaku pengelola pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten di bidangnya	80%	Persen	85,00%	100,00%	117,65%	80,00%	117,65%
	Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas		Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas
	1. Rapat penyusunan daftar ASN dan Non ASN yang akan mengikuti bimtek/pelatihan peningkatan kompetensi	1	Dokumen	1		1		100%
	2. Memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti bimtek/pelatihan peningkatan kompetensi	40	Orang	35		35		100,00%
	3. Menyusun ABK Fungsional PPBJ dan pemenuhan jumlah Fungsional PPBJ	1	Dokumen	1		1		100%

Penjelasan per Indikator Kinerja

Upaya

1. Optimalisasi pemenuhan nilai ITKP kategori Baik bagi Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalsel
2. Memfasilitasi ASN dan Non ASN yang akan mengikuti bimtek/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi

Hambatan

1. Efisiensi anggaran TA.2025, mengakibatkan terbatasnya anggaran untuk pembinaan ke UKPBJ Kabupaten/Kota se-Kalsel
2. Adanya efisiensi anggran TA.2025, mengakibatkan terbatasnya anggaran untuk mengikuti peningkatan kompetensi bagi ASN

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefisien mungkin dan yang prioritas

Banjarbaru, 30 Desember 2025

Mengetahui :
Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,



Drs. KHAILIL ANWAR MM
NIP. 196812071990031008

Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa,

ASAN SE
NIP. 19690702 198903 1 004

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN PEMBINAAN SAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	TARGET DAN CAPAIAN			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan September (realisasi:targetx100%)
					Target Indikator	Realisasi s.d Bulan ini	% Capaian		
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan Kualitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ Provinsi, Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3	84,62%	Persen	85,00%	100,00%	117,65%	100,00%	117,65%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Melaksanakan pembinaan ke UKPBJ Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pencapaian level 3 dan nilai ITKP kategori Baik	13	Kabupaten/Kota	10	10	100%		
		2. Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis UKPBJ Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalsel	2	Kegiatan	2	2	100%		
		3. Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah UKPBJ Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalsel	2	Kegiatan	2	2	100%		
		Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	80%	Persen	85,00%	100,00%	117,65%	100,00%	117,65%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Penyusunan dan Pengajuan Kebutuhan Pejabat Fungsional PPPBJ	1	Dokumen	1	1	100%		
		2. Memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti bimtek/pelatihan peningkatan kompetensi	53	Orang	35	35	100,00%		
		3. Menyusun ABK Fungsional PPBJ dan pemenuhan jumlah Fungsional PPBJ	1	Dokumen	1	1	100%		
2.	Meningkatnya kualitas Layanan Konsultasi Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terpenuhinya Layanan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Optimalisasi pendampingan pengadaan barang/jasa SKPD lingkup Pemprov Kalsel	12	Laporan	12	12	100,00%		
		2. Dokumen permasalahan dan tindak lanjut sanggah pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa	12	Dokumen	12	12	100,00%		

3.	Meningkatnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Rapat evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	12	Laporan	12	12	100%		
		2. Arahan terhadap disiplin pegawai, penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan, penatausahaan aset dan persuratan yang harus disampaikan setiap bulannya	12	Nota Dinas	12	12	100%		
		3. Rapat dan arahan dalam penusunan LKPJ dan LPPD	2	Laporan	2	2	100%		
4. Persentase pemenuhan indikator SPIP	75%	Persen	85%	85%	100%				
4	Meningkatnya Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Perencanaan Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik	100%	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas	Capaian Aktifitas		
		1. Rapat koordinasi dengan tim penyusunan Renstra, Renja, RKPD dan RKA Tahun 2025	4	Laporan	4	4	100%		
		2. Rapat dan arahan dalam penyusunan dan pemenuhan indikator LAKIP	12	Dokumen	12	12	100%		

Penjelasan per Indikator Kinerja

Upaya

1. Optimalisasi pemenuhan nilai ITKP kategori Baik bagi Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalsel
2. Memfasilitasi ASN dan Non ASN yang akan mengikuti bimtek/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi
3. Optimalisasi pemenuhan indikator AKIP
4. Optimalisasi pelayanan administrasi tata usaha/kesekretariatan
5. Optimalisasi pemenuhan indikator SPIP
6. Optimalisasi pendampingan pengadaan barang/jasa SKPD lingkup Pemprov Kalsel

Hambatan

1. Adanya efisiensi anggaran TA.2025, mengakibatkan terbatasnya anggaran untuk mengikuti peningkatan kompetensi bagi ASN
2. Jumlah anggaran yang minim/kurang dalam pemenuhan layanan kesekretariatan
3. Masih kurangnya SDM yang memahami Akuntabilitas Kinerja dan SPIP

Rencana Tindak Lanjut


1. Meningkatkan kompetensi SDM terutama tentang AKIP dan SPIP
2. Konsultasi dan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemprov Kalsel

Mengetahui :
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa


Dr. RAHMADDIN MY. A.Ks. M.Si
NIP. 197403101999031005

Banjarbaru, 30 Desember 2025

Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,


Drs. KHAILIL ANWAR MM
NIP. 196812071990031008

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan Desember (realisasi:target x 100%)
					Target	Realisasi Bulan Ini	Capaian		
1.	Terkelolanya strategi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Laporan	12	12	100%	12	12
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas					
		Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi pengadaan barang dan jasa	2	Laporan	2	2	100%		
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	Persen	100	100	100%	100%	100%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas					
		Melakukan pengarsipan paket tender yang selesai melalui hasil review untuk di masukkan ke aplikasi simadi	12	Dokumen	12	12	100%		
		Persentase Hasil Riset Analisa Pasar Yang Digunakan Oleh Pengguna Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Persen	100	100	100%	100%	100%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas					
		1. Melakukan riset dan survey pasar terkait pengadaan barang dan jasa	12	Dokumen	12	12	100%		
		2. melakukan belanja cetak dan jilid buku hasil survey pasar terkait pengadaan barang dan jasa	12	Dokumen	12	12	100%		
		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Persen	100	100	100%	100%	100%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas					
		1. Membuat nota dinas , undangan, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan , Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan, Surat Edaran Pimpinan (Gubernur /Sekda Kalsel) dalam rangka strategi pengelolaan barang dan jasa	12	Dokumen	12	12	100%		

Penjelasan :

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi pengadaan barang dan jasa untuk Bulan Desember Tahun 2025 sebesar 100%
- Melakukan pengarsipan paket tender yang selesai melalui hasil review untuk di masukkan ke aplikasi simadi untuk Bulan Desember Tahun 2025 sebesar 100%
- Hasil riset analisa pasar yang efektif untuk Bulan Desember Tahun 2025 sebesar 100%
- Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalsel yang menerapkan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa untuk Bulan Desember Tahun 2025 sebesar 100%

Mengetahui :
 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,

HERNANI PATRIA DHARMA, S. JP
 NIP. 199003292012061002

Banjarnbaru, 29 Desember 2025
 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi
 Pengadaan Barang dan Jasa,

M. ARI YUDONO SARIMAN, ST
 NIP. 197405012009031005


LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

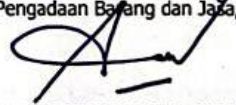
NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan Oktober (realisasi:target x 100%)
					Target	Realisasi Bulan ini	Capaian		
1.	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Laporan	100%	8.33%	100.00%	100%	100%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas					
		1 Membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12	Laporan	12	1	1	100%	
		Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD							
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas					
		1 Mengusulkan nama Pejabat Pengadaan pada SKPD sesuai dengan permintaan	12	Dokumen	12	1	1	100%	
		2 Mengusulkan Pokja Pemilihan berdasarkan usulan paket tender/seleksi							
		Persentase pengelolaan paket tender yang diproses dengan tepat waktu dan sesuai aturan	100%	Dokumen	100%	8.33%	100.00%	100%	100%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas					
		1. Jumlah paket tender dan seleksi yang masuk dan diproses oleh Pokja Pemilihan	12	Dokumen	12	1	1	100%	

Mengetahui :
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,


HERNALFY PATRIA DHARMA, S. IP
NIP. 199003292012061002

Banjarbaru, 29 Desember 2025
Kepala Sub Bagian Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa,


Ir. ANDRIE ISWANDI S.T., M.I.Kom
NIP. 198101172010011009

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA BULAN NOVEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

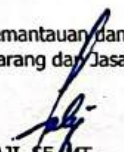
No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	TARGET DAN CAPAIAN			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan November (realisasi:targetx100%)
					Target Aktifitas	Realisasi s.d Bulan ini	% Capaian		
1	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang dan jasa	100%	Laporan	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas	
		1. Membuat Dokumen Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	Laporan	12	12		100%	
		Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	82.20	Dokumen	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas	
		1. Menyusun Dokumen Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	12	12		100%	
		2. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada SKPD/UPT Lingkup Pemprov Kaltel	12	Dokumen	12	12		100%	
		Persentase realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia	74.04%	Paket	70%	81,76%	81,76%	70%	81,76%
		Aktifitas yang Berhubungan Dengan Indikator	Capaian Aktifitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktifitas	Target Aktifitas	Realisasi Aktifitas		Capaian Aktifitas	
		1. Pembuatan Nota Dinas dan Surat SEKDA terkait Kesesuaian antara Rencana Umum Pengadaan dan Realisasi Tender ke SKPD	12	Dokumen	12	12		100%	

Penjelasan per Indikator Kinerja

- Upaya : Optimalisasi Persentase Jumlah perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa secara tepat waktu dan akurat
 Optimalisasi realisasi belanja SKPD terhadap RUP melalui penyedia.
- Hambatan : Masih adanya SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu.
- Rencana Tindak Lanjut : Diupayakan dan dihimbau kepada SKPD/Unit Kerja agar dapat segera menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang dan jasa, baik melalui surat maupun email.

Mengetahui :
 Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,

HERNALFY PARTIA DHARMA, S.IP
 NIP. 199003292012061002

Banjarnbaru, 29 Desember 2025
 Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi
 Pengadaan Barang dan Jasa,

FAHRURAJI, SE, MT
 NIP. 197001102007011019

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NAMA SKPD : BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	TARGET DAN CAPAIAN			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan September (realisasi:targetx100%)
					Target Indikator	Realisasi sampai Bulan ini	% Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Ketentuan	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Laporan	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%
		Aktifitas yang berhubungan dengan indikator	Capaian aktifitas tahun lalu	Satuan aktifitas tahun lalu	Target aktifitas		Realisasi aktifitas		Capaian aktifitas
		Persentase Pemenuhan Layanan Publik	0	Persen	90%	90%	90%	90%	90.00%
		Rasio Gangguan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang dapat diselesaikan	0.8	Laporan	0.8	0.8	0.8	0.8	100%

Penjelasan per Indikator Kinerja

- 1 Pemenuhan Layanan LPSE sesuai ketentuan
- 2 Penyelesaian gangguan sistem yang dilaporkan ke LPSE Prov.Kalsel

Upaya

1. Perencanaan dan mengevaluasi dalam pelaksanaan rapat pada tiga sub bagian untuk Pemenuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai ketentuan.
2. Optimalisasi dalam pemberian informasi seputar pengadaan barang dan jasa secara elektronik
3. Pemantauan dan evaluasi terkait Rasio Gangguan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang dapat diselesaikan.

Hambatan

Ketidaksesuaian dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengadaan barang jasa secara elektronik

Rencana Tindak Lanjut

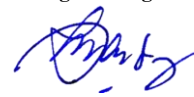
Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara sistem pengadaan elektronik dengan sistem lain yang ada dalam organisasi untuk memastikan kelancaran operasionalnya

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



Dr. RAHMADDIN, MY, A.Ks, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740310 199903 1 005

Banjarbaru, 30 Desember 2025
Kepala Bagian Pengelolaan LPSE



Mahrita Yanuarty, S.Pi, M.S
Pembina Tk. I
NIP. 19710101 199703 2 009

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NAMA JABATAN : SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Bulan Oktober (realisasi:targetx100%)
					Target Indikator	Realisasi sampai Bulan Ini	% Capaian		
1.	Terkelolanya informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12	Laporan	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%
		Persentase Pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses untuk masyarakat/pengguna layanan pengadaan barang dan jasa	100%	Laporan	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%
		Aktifitas yang berhubungan dengan indikator	Capaian Aktifitas tahun lalu	Satuan aktifitas tahun lalu	Target aktifitas		Realisasi aktifitas		Capaian aktifitas
		Persentase Dokumentasi Data dan Informasi Barang dan Jasa	12	Laporan	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%

Penjelasan per Indikator Kinerja

- Peningkatan jumlah pengguna atau pemakai informasi PBJ yang mengakses website resmi
- Dokumentasi data-data informasi dari pengadaan

Upaya

- Optimalisasi startegi dan teknik untuk meningkatkan pengunjung dari SKPD atau pihak lain yang mengakses informasi pada website resmi LPSE Provinsi Kalimantan Selatan dan media sosial Biro PBJ
- Dokumentasi Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Hambatan : -
Rencana Tindak Lanjut : -
Meningkatkan kecepatan kinerja secara keseluruhan.

Mengetahui :

Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,
Mahrita Yanuarty, S.Pi, M.S

NIP. 19710101 199703 2 009

Banjarbaru, 30 Desember 2025

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Infomasi Pengadaan Barang dan Jasa,
NOOR KHALIDAH, S.Sos.I

NIP. 19800602 201001 2 004

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D BULAN DESEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALSEL
NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja bulan Desember (Realisasi target x 100%)
					Target Indikator	Realisasi sd. bulan ini	% Capaian		
1	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase SKPD yang menyusun dan menginput RUP serta diumumkan pada SIRUP tepat waktu	119	SKPD dan unit kerja	119 SKPD dan unit kerja	119 SKPD dan unit kerja	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktivitas yang berhubungan dengan indikator	Capaian Aktivitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktivitas	Target Aktivitas		Realisasi Aktivitas		Capaian Aktivitas
		1. Membuat Rekapitulasi SIRUP	12	laporan	12		12		100,00%
		Persentase layanan konsultasi/pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/unit kerja/penyedia/pokja di lingkup Pemprov. kalsel	12	laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktivitas yang berhubungan dengan indikator	Capaian Aktivitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktivitas	Target Aktivitas		Realisasi Aktivitas		Capaian Aktivitas
		1. Memberikan layanan konsultasi	12	laporan	12		12		100,00%
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12	laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	100,00%	100,00%
		Aktivitas yang berhubungan dengan indikator	Capaian Aktivitas Tahun Lalu	Satuan Indikator Aktivitas	Target Aktivitas		Realisasi Aktivitas		Capaian Aktivitas
		1. Membuat Laporan	12	laporan	12		12		100,00%

Penjelasan per indikator kinerja :

1. Persentase SKPD dan unit kerja yang menyusun dan menginput RUP serta diumumkan pada SIRUP tepat waktu

Upaya :

1. Memonitor penginputan SIRUP oleh seluruh SKPD dan unit kerja
2. Memberikan pendampingan terkait permasalahan penginputan SIRUP

Hambatan :

SKPD dan unit kerja melakukan revisi penginputan SIRUP, namun setelah melakukan revisi terlambat untuk melakukan penginputan sebesar 100%

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memberikan teguran setiap hari melalui WA grup SIRUP kepada SKPD dan unit kerja yang penginputan SIRUP belum 100% dengan menginformasikan posisi RUP berdasarkan data Aplikasi SIMANTEV dan Memastikan SKPD terkait mengembalikan posisi RUP menjadi 100% sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah disampaikan
2. Persentase layanan konsultasi/pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/unit kerja/penyedia/pokja di Wilayah Pemprov. kalsel

Upaya :

Selalu Memberikan layanan yang terbaik.

Hambatan :

Masih ada SKPD/unit kerja/penyedia yang belum memahami terkait SPSE dikarenakan pergantian Admin/ Operator

Rencana tindak Lanjut :

Terus memberikan pelayanan dan pembinaan yang terbaik kepada stakeholder

Banjarbaru, Desember 2025

Mengetahui :

Kabag Pengelolaan LPSE



MAHRITA YANUARTI, S.PI, M.S

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710101 199703 2 009

Kasubbag Pengelolaan SPSE



ALFIANSYAH, SE, MM

Pembina (IV/a)

NIP.19791116 200804 1 001

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA S.D DESEMBER 2025

NAMA SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALSEL

NAMA JABATAN : SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu	Satuan Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja (Realisasi:targetx100)
					Target Indikator	Realisasi sampai bulan ini	% Capaian		
1	Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4	Laporan	12	12	100%	12	100%
		Aktifitas yang berhubungan dengan indikator	Capaian Aktifitas tahun lalu	Satuan aktifitas tahun lalu	Target aktifitas		Realisasi Aktifitas		Capaian aktifitas
		1.Menyusun dan melaksanakan pengembangan sistem informasi pendukung barang dan jasa	12	Laporan	12	12	100,0%	12	100,00%

Penjelasan Indikator Kinerja

Upaya :

1. Melakukan rapat dengan stakeholder aplikasi pendukung pengadaan
2. Menyusun dan menganalisa identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan

Hambatan : -

Rencana Tindak Lanjut :

1. membuat dokumen administrasi pengembangan sitem informasi

Kabag Pengelolaan LPSE

Mahrta Yanuarti, S.Pi, M.S
Pembina Utama Muda
NIP. 19710101 199703 2 009

Banjarbaru, 30 Desember 2025
Kasubbag Pengembangan Sistem Informasi

Muhammad Noor Fuady, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19851229 201101 1 001